

**pANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENERAPAN AKUNTANSI  
TINGKAT HARGA DASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SUMARNI  
105730426513**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENERAPAN AKUNTANSI  
TINGKAT HARGA DASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KOTA MAKASSAR**

**OLEH**

**SUMARNI  
105730426513**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjanah  
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Laporan Keuangan dengan Peningkatan Akuntansi  
Tingkat Harga Dasar pada Perusahaan Daerah Air Minum  
Kota Makassar

Nama Mahasiswa : SUMARNI

NIM : 10573 04265 13

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia  
penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pada  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar.

Makassar, 22 Desember 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Drs. H. Sanusi A.M., S.E., M.Si.  
NIDN: 0027035501

Pembimbing II

Amran, S.E., M.Ak. Ak. CA.  
NIDN: 0915116902

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Ismail Rasulong, SE., MM.  
NBM: 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA. CSP.  
NBM: 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**




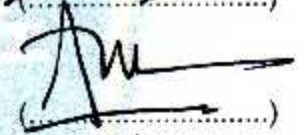

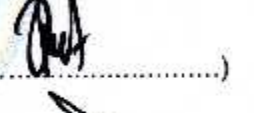
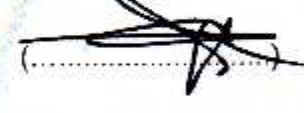
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **SUMARNI**, NIM: **10573 04265 13**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 123/2018, tanggal 15 Rabiul Akhir 1440 H/22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

**Panitia Ujian**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, S.E., M.Si. Ak. CA.   
2. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M.   
3. Muchriana Muchran, S.E., M.Si. Ak. CA.   
4. Samsul Rizal, S.E, M.M. 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, S.E., M.M.**

NBM: 903078





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARNI  
Stambuk : 10573 04265 13  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan Judul : Analisis Laporan Keuangan dengan Penerapan Akuntansi Tingkat Harga Dasar pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,

**BERTERAI**  
**KEMPEL**  
25AFF392137126  
**5000**  
RUPIAH  
**Sumarni**

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

**Ismail Rasulong, S.E., M.M.**  
**NBM : 903073**

Ketua Program Studi Akuntansi

**Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.**  
**NBM : 107 3428**

## MOTTO

“Janganlah berusaha untuk menjadi orang sukses saja, tapi berusahalah untuk menjadi orang yang penuh dengan peluang.”

“Bangkitlah setiap kali kamu jatuh. Jika tidak, kamu akan tertinggal.”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”(Q.S. Al-Insyirah:6)

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Allah SWT di atas segalanya, yang telah membimbing langkah hambanya dengan segala kuasa-Nya.

Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah lelah untuk selalu mensupport secara moril dan materil.

Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar saya dapat meraih apa yang saya cita-citakan.

Semua teman yang telah membantu dalam memberikan motivasi dan semangat dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **ABSTRAK**

**SUMARNI**, Tahun 2018 Analisis Laporan Keuangan dengan penerapan akuntansi tingkat harga dasar pada perusahaan daerah air minum kota Makassar, skripsi program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar. dibimbing oleh pembimbing I Sanusi A.M dan pembimbing II Amran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian analisis laporan keuangan dengan penerapan akuntansi tingkat harga dasar yang diterapkan oleh perusahaan daerah air minum dengan perhitungan sesuai dengan laporan keuangan. penelitian ini menggunakan daftar laporan keuangan tahun 2015 sampai 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kuantitatif yaitu membandingkan analisis laporan keuangan dengan penerapan akuntansi tingkat harga dasar pada perusahaan daerah air minum kota Makassar.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa: Rasio likuiditas 2015 sebesar 5080,04 %; tahun 2016 sebesar 4189,93 % dan tahun 2017 sebesar 3104,49 %. Rasio Solvabilitas Tahun 2015 sebesar 7630,58 % ;tahun 2016 sebesar 1125,17 % dan tahun 2017 sebesar 1511,20 %. Untuk rasio rentabilitas tahun 2015 sebesar 1501,92 % ; tahun 2016 sebesar 1695,06 % dan tahun 2017 sebesar 1753,53 %. Sehingga Perusahaan daerah air minum kota makassar dapat memperoleh laba yang meningkat dari tahun ketahun.

**Kata kunci : Laporan Keuangan, Tingkat Harga dasar.**

## ABSTRACT

*SUMARNI, 2018 Analysis of Financial Statements with the implementation of Base price level accounting in the Makassar municipal water company, the thesis of the accounting study program at the faculty of economics and business at the Muhammadiyah University of Makassar. guided by mentor I Sanusi A.M and counselor II Amran.*

*This study aims to determine the suitability of financial statement analysis with the application of Base price level accounting applied by regional drinking water companies with calculations in accordance with financial statements. This study uses a list of financial statements from 2015 to 2017. The type of research used in this study is quantitative research, namely comparing the analysis of financial statements with the application of Base price level accounting at regional drinking water company in Makassar.*

*From the results of the study it was found that: 2015 liquidity ratio of 5080.04%; in 2016 amounted to 4189.93% and in 2017 amounted to 3104.49%. Solvability ratio in 2015 was 7630.58%, in 2016 amounted to 1125.17% and in 2017 amounted to 1511.20%. For the 2015 profitability ratio of 1501.92%; in 2016 amounted to 1695.06% and in 2017 amounted to 1753.53%. So that Regional drinking water companies in the city of Makassar can obtain increased profits from year to year.*

*Keywords: Financial report, Base price level.*



## KATA PENGANTAR



### **Bismillaahirrahmaanirrahim**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Lapoaran Keuangan dengan Penerapan Akuntansi Tingkat Harga dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar ”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Abakar dan ibu Saya terutama Kakak Saya yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs.H.Sanusi A.M., SE, M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Amran, SE.,M.Ak.Ak.CA selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2017 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis. Khususnya kepada Seluruh teman AK.6-13 yang telah memberikan dukungannya.
9. Terimah kasih kepada sahabat saya Nurhahayati ali, Indriyanti, Erni wati Fadlun, Arni, Junari, kurnia,Dini Andriani, Ayu Indah lestari, dan Ika Mayasari yang selalu memberikan dukungannya dan selalu menemani saya walaupun dengan keadaan lelah.
10. Seluruh Staf karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

*Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, 07 Oktober 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Laporan Keuangan .....	4
1. Pengertian laporan keuangan .....	4
2. Tujuan laporan keuangan.....	7
3. Prosedur analisis laporan keuangan .....	8
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja.....	13
5. Analisis sumber dan penggunaan kas ( <i>cas flow statement analysis</i> ).....	13

6. Analisis rasio .....	13
7. Analisis perubahan laba kotor ( <i>gross profit analysis</i> ) .....	13
8. Analisis <i>break-even</i> .....	14
B. Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI .....	17
C. Akuntansi Tingkat Harga dasar .....	17
D. Penelitian Terdahulu .....	21
E. Kerangka Pikir .....	33
F. Hipotesis .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
B. Teknik Pengumpulan Data .....	34
C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum kota Makassar .....	36
B. Hasil Penelitian .....	67
C. Pembahasan .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
DAFTAR LAMPIRAN .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	28
2. Rekapitulasi data keuangan untuk menghitung Rasio Likuiditas .....	66
3. Rekapitulasi data keuangan untuk menghitung Rasio Solvabilitas .....	67
4. Rekapitulasi data keuangan untuk menghitung Rasio Rentabilitas .....	67
5. Hasil Analisis Rasio Likuiditas dengan perhitungan <i>Current Ratio</i> .....	68
6. Hasil Analisis Rasio Likuiditas dengan perhitungan <i>Quick Ratio</i> .....	69
7. Hasil Analisis Rasio Solvabilitas dengan perhitungan <i>Debt to Equity Ratio</i>	71
8. Hasil Analisis Rasio Solvabilitas dengan perhitungan <i>Debt to Total Asset Ratio</i> .....	73
9. Hasil Analisis Rasio Rentabilitas dengan Perhitungan <i>Net Rate of ROI</i> ...	74
10. Hasil Analisis Rasio Rentabilitas dengan Perhitungan <i>ROE</i> .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Gambar Kerangka Pikir .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Gambar Laporan Keuangan .....	82



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang dibutuhkan baik oleh internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan tersebut harus dapat memberikan informasi yang lebih realitis dan dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang mendekati keadaan sebenarnya.

Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost accounting*) yang menggunakan harga pada saat terasaksi dan menganggap bahwa harga-harga yang stabil. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perusahaan daya beli, sehingga laporan keuangan pada perusahaan daerah air minum kota Makassar, yang dihasilkan kurang mampu mencerminkan keadaan sebenarnya jika terjadi perubahan harga.

Hal tersebut akan menyebabkan ketidakakuratan dan ketidak telitian dari laporan keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang disajikan hingga pihak internal maupun eksternal perusahaan dapat dihilangkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Dengan sendirinya laporan keuangan Pada Perusahaan daerah air minum kota Makassar tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan begitu saja tanpa adanya tambahan informasi.

Terjadi perubahan daya beli terutama inflasi yang cukup tinggi akan menyebabkan semakin tinggi ketidakakuratan laporan keuangan pada Perusahaan daerah air minum kota Makassar yang dihasilkan. Agar dapat

mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau paling tidak mendekati keadaan yang sebenarnya, laporan keuangan dapat disusun dengan menggunakan akuntansi tingkat harga (*general price level accounting*), yang mampu menyatakan nilai sesungguhnya dari rupiah (daya beli rupiah). Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin besar perbedaan yang dihasilkan antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan nilai historis dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi tingkat harga dasar.

Perlu tidaknya penyajian kembali laporan keuangan dengan menggunakan akuntansi tingkat harga dasar telah dipelajari secara empiris melalui penelitian yang telah dilakukan oleh (1) Kery Ssoejipto (2000) dan (2) Iven Susanto dan Ivenne Moniaga F.P (2002) mengenai pengaruh akuntansi tingkat harga dasar terhadap laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, neraca, dan laporan laba ditahan, dan rasio keuangan perusahaan. kedua penelitian tersebut ternyata memberikan kesimpulan yang sama dalam hal adanya perbedaan antara nilai historis dibandingkan dengan nilai berdasarkan tingkat harga dasar. Namun, dari keduanya juga didapatkan adanya perbedaan dalam hal perlu tidaknya dilakukan penyusuaian laporan keuangan berdasarkan tingkat harga dasar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, tulisan ini disajikan dalam rangka untuk memberikan analisis dan evaluasi mengenai perlu tidaknya penerapan *general pricelevel accounting* dalam penyajian laporan keuangan dengan membandingkan hasil kedua penelitian tersebut diatas yang memusatkan pada pengaruh *general price-level accounting* terhadap laporan keuangan dan rasio keuangan dari industri yang sejenisnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan bahwa perusahaan dalam menjalankan roda bisnis memerlukan laporan keuangan akurat dalam hal ini penerapan akuntansi tingkat harga. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan adalah “Apakah laporan keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar telah menerapkan akuntansi tingkat harga dasar. Sesuai tingkat harga yang ditetapkan Perusahaan Daerah Air minum Kota Makassar ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui apakah laporan keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar telah menerapkan akuntansi tingkat harga dasar”.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan akuntansi khususnya tingkat harga dasar disuatu perusahaan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran melalui penelitian dalam menganalisis laporan keuangan dengan penerapan akuntansi tingkat harga dasar dapat diterima sebagai masukan bagi perusahaan.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
4. Penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta dapat memberi kontribusi bagi pembaca.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Laporan Keuangan**

##### 1. Pengertian Laporan Keuangan.

Menurut Kasmir (2015), Laporan keuangan (*financial statements*) adalah dokumen bisnis perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai pihak yang berkepentingn terhadap laporan keuangan, dapat meliputi pemilik, manajemen, kreditor, dan investor. Sebaliknya, pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang dilaporkan untuk membuat berbagai keputusan seperti apakah akan melakukan infestasi dalam atau meminjamkan uang kepada perusahaan untuk mempelajari akuntansi, anda harus berfokus pada keputusan.

Secara umum laporan keuangan yang disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost accounting*). Dengan prinsip ini laporan keuangan disusun dengan menggunakan harga-harga yang timbul dari trasaksi. Sebagai alat pengukur dan pertukaran didalam ekonomi yang digunakan satuan unit moniter kondisi inflasi menyebabkan satuan unit moniter menjadi tidak stabil. Sehingga penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen suatu perusahaan merupakan hasil akhir dari proses atau kegiatan-kegiatan akuntansi yang dilakukan perusahaan. Laporan keuangan dibuat untuk mempertanggung jawabkan kegiatan perusahaan terhadap pemilik dan memberi informasi mengenai posisi keuangan yang telah dicapai perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu laporan tertulis yang

merupakan bentuk pandangan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Myer dalam bukunya "*Financial Statement Analysis*" yang diterjemahkan oleh Munawir (1995: 5) laporan keuangan adalah "Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca dan daftar posisi keuangan dan daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan). "Melalui laporan keuangan itu, secara *periodic* dilaporkan informasi penting mengenai suatu perusahaan yang berupa:

- a. Informasi mengenai sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan modal perusahaan.
- b. Informasi mengenai perubahan-perubahan dalam sumber-sumber ekonomi netto atau kekayaan bersih (modal= Aktiva dikurangi kewajiban). Yang timbul dari aktivitas usaha perusahaan dalam memperoleh laba.
- c. Informasi mengenai hasil usaha perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai dan membuat estimasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
- d. Informasi mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, yang disebabkan oleh aktivitas pembelanjaan dan investasi.

e. Informasi penting lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan, seperti kebijaksanaan akuntansi yang dianut oleh perusahaan. Pangaribuan dan yahya (2009) menyatakan bahwa. " analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk kepentingan mengambil keputusan bisnis.

Membantu mngambil keputusan dengan melakukan evaluasi atas tingkat bisnis perusahaan, strategis, serta kinerja keuangannya. Menurut halsey, dkk (2005) dalam hamonangan dan siregar (2009), analisis laporan keuangan adalah aplikasih dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan yang bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Taharap (2008:190) mendefinisikan analisis laporan keuangan adalah: "menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat ". Dari definisi yang telah diberikan diatas maka dibuat suatu kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan yang membedah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan untuk mencari suatu hubungan antara usur-unsur atau komponen-komponen dalam laporan keuangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil

perusahaan hingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pembuatan suatu keputusan bisnis dan investasi.

## 2. Tujuan laporan keuangan.

Laporan keuangan menjadi alat yang penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang cukup penting dalam mengambil suatu keputusan ekonomi laporan keuangan menyajikan mengenai apa yang telah terjadi, sementara itu digunakan juga membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Analisis laporan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan misalnya dapat digunakan sebagai alat *screening* awal dalam memilih alternatif investasi atau *merger*", sebagai alat *forecasting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan dimasa akan datang; sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen .(prastowo dan juliaty, 2008:57).secara umum laporan keuangan bertujuan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:



- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Informasi keuangan lainnya. Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. kemudian laporan tidak hanya cukup dibaca saja, tetapi juga harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini. Caranya adalah dengan melakukan analisis keuangan melalui berbagai rasio yang lazim dilakukan.

### 3. Prosedur Analisis Laporan Keuangan.

Sebagai langkah harus ditempuh dalam melakukan suatu analisis terhadap laporan keuangan. Adapun langkah yang harus di tempuh menurut prostowo dan juliati (2008:58) adalah sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan mencakup pemahaman tentang

pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan ditetapkan oleh perusahaan.

- b. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai *trend* (kecendrungan) industri dimana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak, dan perubahan yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan manajemen kunci.
- c. Mempelajari dan mereview laporan keuangan tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- d. Menganalisis laporan keuangan setelah memahami profil perusahaan mereview laporan keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut (bila perlu disertai rekomendasi).

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada saat periode tertentu. Dan untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal pihak perusahaan. pihak yang

berkepentingan tentu pemilik perusahaan dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan.

Dan hasil akhir dari suatu proses akuntansi adalah laporan keuangan yang merupakan cerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu. Selain digunakan sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009: 3). laporan keuangan bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan.
- 2) Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- 4) Metode dan teknik analisis laporan keuangan.

Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai informasi dalam laporan keuangan, maka dalam satu analisis laporan keuangan yang menggunakan suatu metode dan teknik agar dicapai tujuan yang diharapkan. Secara umum, menurut Prastowo dan Julianti

(2008:59), metode analisis dalam laporan keuangan dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu:

a. Metode analisis horizontal ( dinamis),

Adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa (periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya disebut metode analisis horizontal karna analisis ini membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. Disebut dengan metode analisis dinamis karna metode ini bergerak dari tahun ketahun (periode). Teknik-teknik analisis yang termasuk diklasifikasi metode ini antara lain teknis analisis perbandingan, analisis *trend* ( *index* ), analisis sumber dan penggunaan dana, analisis perubahan laba kotor.

b. Metode analisis vertikal (statis),

Adalah metode analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan hanya satu (periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk satu (periode) yang sama. Oleh karna membandingkan antara pos yang satu dan pos yang lainnya pada laporan keuanga yang sama, maka disebut metode vertikal disebut metode statik karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun (periode) yang sama. Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis presentase perkomponen, (*common-sizen*), analisis *ratio*, dan analisis impas.

Teknik analisis terhadap laporan keuangan yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010:36) adalah sebagai berikut:

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
  - 1) Data absolut atau jumlah dalam rupiah
  - 2) Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah
  - 3) Kenaikan atau penurunan dalam presentase
  - 4) Perbandingan yang dinyatakan dalam *ratio*
  - 5) Presentase dari total

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat di ketahui perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang memperlihatkan penelitian lebih lanjut.

1. *Trend* atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam analisis *ternd* perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis dinamis dan horisontal. data yang digunakan adalah data tahun atau periode yang digunakan biasanya hanya dua atau tiga periode saja.
2. Persentase perkomponen adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. hasil analisis dibuatkan dalam bentuk persentase. Artinya mengubah jumlah rupiah dalam laporan keuangan menjadi persentase. Tujuan analisis persentase perkomponen adalah untuk mengetahui hal-hal antara lain:

- a. Persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau passiva.
- b. Struktur permodalan
- c. Komposisi biaya dalam penjualan.

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja

Suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau sebab-sebab berubahannya modal kerja dalam periode tertentu.

5. Analisis sumber dan penggunaa kas (*cash flow statement analysis*).

Adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahannya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.

6. Analisis rasio.

Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Jadi analisis rasio merupakan kegiatan perbandingan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dalam komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

7. Analisis perubahan laba kotor (*gross profit analysis*),

Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode keperiode yang lain atau perubahan

laba kotor suatu periode dengan laba yang ditargetkan untuk periode tersebut.

#### 8. Analisis *break-even*

Adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus di capai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis *break-even* ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. Menurut Dewi Astuti (2004) dan aulia ( 2007:29) ada tiga tipe perbandingan hasil analisis rasio keuangan yaitu:

##### a. Analisis *cross-sectional*

Membandingkan hasil analisis rasio keuangan atau perusahaan dengan nilai analisis keuangan perusahaan sejenis dalam industri yang sama dalam waktu yang sama.

##### b. Analisis *time-series*

Mengevaluasi kinerja perusahaan dengan cara membandingkan hasil analisis rasio keuangan pada periode yang satu dengan hasil analisis rasio keuangan pada periode yang lain dalam perusahaan yang sama.

##### c. Analisis gabungan

Gabungan antara analisis *cross-sectional* dan analisis *time-series*. Dengan mengetahui periode dan teknik dalam menganalisis laporan keuangan, maka pemakai laporan keuangan dapat lebih memahami informasi yang terkandung didalamnya sehingga membuat suatu keputusan ekonomi yang tepat berdasarkan hal tersebut.

#### d. Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu: sebagai pertanggungjawaban.

Manajemen kepada pemilik perusahaan, alat komunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan terhadap perusahaan, seperti para kreditur/ calon kreditur, investor/ calon investor, bankers, permintaan dan lain-lain, sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang efektif bagi manajemen, misalnya:

- a. Mengukur tingkat biaya dari kegiatan perusahaan
- b. Untuk mengukur efisiensi proses produksi dan tingkat keuntungan yang dicapai.
- c. Untuk menentukan perlu tidaknya kebijakan atau prosedur baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Laporan keuangan merupakan komponen menciptakan akuntabilitas. laporan keuangan digunakan untuk memberi timbangan *decision making*. Laporan keuangan yang dipakai untuk menilai kinerja organisasi laporan keuangan merupakan komponen penting menciptakan akuntabilitas . laporan keuangan untuk memberi pertimbangan *dicision making*. Laporan keuangan dipakai untuk menilai kinerja organisasi.

##### a. Sifat laporan keuangan

Laporan keuangan yang disiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periode yang dilakukan pihak *management*



yang bersangkutan jadi laporan keuangan yang bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu *progress report* laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara:

b. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*)

Laporan keuangan disebut atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan dibank, jumlah piutang, persediaan barang dagang, hutang maupun aktiva tetap yang di miliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi masa lampau dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadi peristiwa tersebut.

c. Prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi (*accounting conviction and postulate*)

Data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*general accounting principles*), hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman.

d. Pendapat pribadi (*personal judgment*).

Walaupun pencatatan transaksi lebih diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dan konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung dari pada akuntansi *management* perusahaan yang bersangkutan.

## **B. Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrua**

Selama beberapa dekade pemerintah Indonesia sudah berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas.kinerja ,trasparansi, dan akuntabilitas pemerintah diindonesia upaya ini mendapatkan momentum dengan reformasi keuangan Negara di pengujung tahun 1990-an berupa yang diterbitkannya tiga paket UU di bidang keuangan Negara UU NO 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara uu no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, uu no.1 5 tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggungjawab dan pengelolaan keuangan Negara.

Dengan demikian perbedaan kongkring yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/ komponen laporan keuangan. perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP akrual terletak pada PSAP 12 mengenai laporan oprasional. Entitas akuntansi melaporkan secara trasparan besarnya beban yang ditanggung. strategi penerapan akuntansi yang berbasis akrual sudah dilakukan mulai tahun 2009, yaitu dengan menyajikan informasi akrual yang pendapatan.

## **C. Akuntansi Tingkat Harga Dasar.**

1. Ni'im (1989:7) menyatakan bahwa definisi akuntansi tingkat harga dasar sebagai berikut: akuntansi tingkat harga dasar merupakan salah satu bentuk akuntansi inflasi yang proses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan tingkat perubahan harga, informasi yang dihasilkan menunjukkan ukuran satuan mata uang dengan tingkat harga dasar yang berlaku.

Penyesuaian atas besaran keuangan untuk inflasi guna mencerminkan nilai harga umum atau tingkat harga dasar dan penggunaan nilai yang telah disesuaikan tersebut dalam akuntansi. Perubahan tingkat harga dasar dapat dihitung atau diukur dengan indeks harga. Indeks harga yang biasa konsumen, yaitu nilai indeks yang menyajikan perubahan periodik dalam biaya kelompok barang-barang terpilih yang dibeli konsumen yang digunakan sebagai ukuran inflasi.

2. Penyusunan berdasarkan nilai historis disesuaikan menjadi berdasarkan tingkat harga dasar dapat dilakukan dengan mengkinversikan nilai historis dengan faktor kinversi menjadi tingkat harga dasar menurut Na'in (1989:50), elemen-elemen laporan keuangan yang harus dilakukan penyesuaian antara lain: aktiva tetap, beban-beban penyusutan yang terkait dengan aktiva tersebut dan menghitung laba setelah penyesuaian.
3. Kontroversi penggunaan akuntansi tingkat harga dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Kontroversi yang berkaitan dengan relevan akuntansi tingkat harga dasar telah dan masih berlangsung saat ini sejumlah argumentasi yang mendukung telah dikembangkan (Richard dan Mytle 1995), yang pertama bahwa laporan keuangan yang tidak yang disesuaikan dengan tingkat harga dasar atau dengan kata lain disajikan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan perubahan kemampuan atau daya beli (*puchasing power*) dari bermacam-macam aset dan klain dalam perusahaan sedangkan laporan yang disajikan tingkat harga dasar menyajikan data yang mencerminkan *puchasing power* dari bermacam aset dan klain dalam mata uang tertentu pada akhir periode.

4. Argumentasi kedua menyatakan bahwa *convetional historical-cost accounting* tidak mengukur pendapat (*income*) dengan sewajarnya sebagai hasil *matching* rupiah dalam laporan laba rugi. Beban yang telah terjadi pada periode sebelumnya dikontrakan dengan pendapatan-pendapatan yang umumnya dicerminkan dalam nilai rupiah tertentu pada saat ini. *General price-level accouting* menyediakan konsep *matching* pendapatan dan beban yang lebih baik karena menggunakan nilai uang konstan (*common valuaen*).
5. Ketiga, *general-level accouting* reletif mudah diterapkan. Hanya sekedar mengganti 'nilai lama ' dengan 'nilai saat ini'*general pricel-level accounting* mencerminkan konsep terakhir dari prinsip akuntansi umum ( *general accepted accounting princiles*). Sebagai akibatnya, dirasa relatif lebih objektif dan dapat diujian sebenarnya. Karakteristik tersebut yang menyebabkan *general price-level accounting* lebih dapat diterima dibanyak perubahan dibandingkan *current-valuen accounting*.
6. Yang keempat, *general price-level accouting* menyediakan informasi yang relevan bagi menejemen dalam evaluasi dan penggunaannya. Jadi laba dan rugi berdasarkan tingkat harga umum dihasilkan dari penanganan item-item moneter yang mereflesikan respon manajemen terhadap inflasi. Pada akhirnya, *general price-level accounting* menyajikan pengaruh inflasi secara umum terhadap laba dan menyediakan hasil investasib ( *rate of returns* ) yang lebih realistik.

Relevansi lebih berkepentingan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena itu informasi yang didasarkan pada nilai historis dianggap kurang relevan untuk tujuan pengambilan keputusan khususnya

dalam kondisi ekonomi yang cenderung mengalami inflasi. Disisi lain, penolakan terhadap *general price-level accounting* didasarkan pada beberapa argumentasi berikut ini. Pertama, kebanyakan studi empiris mengindikasikan bahwa relevansi dari informasi tingkat harga juga lemah atau dengan kata lain tidak dapat diterima. Kedua tingkat harga merubah rekening hanya untuk merubah dalam tingkat harga secara dan tidak merubah rekening kedalam tingkat harga tertentu. Jadi, penanganan laba rugi untuk aset-aset non-moneter tidak diakui dan para pengguna data yang disesuaikan pada tingkat harga dasar mungkin mempercayai bahwa perubahan nilai-nilai telah berkorespondensi dengan nilai saat ini. Ketiga, pengaruh atau akibat adanya inflasi akan berbeda dalam berbagai perusahaan-perusahaan yang intensif modal akan lebih dipengaruhi oleh inflasi dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang dipenuhi dengan aset-aset jangka pendek.

Keempat, biaya-biaya diimplementasikan lebih besar dari nilai pokoknya dalam *general price-level accounting* dibanding *benefit*.

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh *finalcial accounting standard board* (FASB) diUSA juga masih tidak memberikan kepastian mengenai perlu tidaknya penggunaan *general price-level accounting* , diantaranya.

- a. *Statement* no.33 yang mengharuskan beberapa perusahaan tertentu untuk menyajikan informasi tambahan dengan mnggunakan *general price-level accounting* dan *current accounting*.

- b. *Statement* no.89 menyatakan bahwa informasi tambahan dengan *general price-level accounting* dan *current cost accounting* sebaiknya disajikan tetapi tidak diharuskan.
- c. Pernyataan standar akuntansi keuangan diindonesia bahwa informasi tambahan antara lain mengenai pengungkapan pengaruh perubahan harga bersifat tidak mengikat.

#### **Konsep tingkat harga dasar**

Menurut sari (2009) tujuan konsep ini adalah menyajikan informasi tentang akibat perubahan harga terhadap suatu perusahaan. Informasi seperti ini berguna bagi manajemen dalam melakukan penilaian terhadap kemajuan perusahaan karena unit moniter yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan unit moniter yang mempunyai daya beli yang sama.

Akuntansi tingkat harga dasar akan mengadakan penyajian kembali komponen-komponen laporan keuangan dalam rupiah pada tingkat daya beli yang sama, namun tidak sama sekali mengubah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam akuntansi berdasarkan nilai historis

#### **D. Penelitian terdahulu**

Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Penelitian tersebut dapat dilihat pada label berikut:

Novita Amelia ( 2009 ). judul penelitian pelaporan keuangan dengan menggunakan metode *general price level accounting* pada PT. Gudang garam Tbk priode 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajaran pelaporan laporan keuangan PT gudang garam Tbk periode 31 Desember 2011 menggunakan metode *general price level accounting* (GPLA). dan hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu bagi perusahaan dapat sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan non-konvensional, bagi pembaca dapat memberikan informasi sebagai bahan perbandingan untuk penulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan ini, sehingga dalam penulisan ini dapat disempurnakan dalam penulisan berikutnya.

Muhammad Bayu Rahma ( 2009 ), judul penelitian analisis sumber dan penggunaan dana pada CV. UJUNG JAYA MEDAN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan dan sumber dana yang tersedia dalam menjalani setiap aktiva perusahaan, untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dana yang diperoleh untuk menjalankan aktivitya, dan mendapatkan cara untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut, sehingga dalam penggunaan tersebut, dana dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hasil dari penelitian sumber dan penggunaan dana CV.UJUNG MEDAN. Sumber dana dapat dari laba bersih, dioperasikan, penambahan hutang, penambahan obligasi, modal dasar, kas. Dan penggunaan dananya digunakan untuk pembayaran deviden, surat-saurat berharga, penambahan piutang, penambahan persediaan, pembelian mesin, penambahan gedung, dan penurunan hutang.

Rhummy Ghulam AJC 2011. Judul penelitian analisis laporan keuangan pada PT bank pembangunan daerah sulawesi selatan adalah bagaimana kinerja PT bank pembangunan daerah sulawesi selatan yang diukur dari ketentuan bank indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank? Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui kinerja keuangan bank bila diukur dari ketentuan bank indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dan (2)

mengetahui tren perubahan-perubahan, berupa kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan selama periode yang dibandingkan. Dalam penelitian ini adalah PT BPD Sulsel pada tahun 2007-2009. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey, tinjau pustaka, serta mengakses web dan situs-situs terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini CAMEL dan analisis perbandingan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kinerja PT BPD Sulsel dengan menggunakan metode CAMEL pada tahun 2007-2009 berada pada predikat sehat walaupun mengalami *trend* yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode yang sama, PT BPD Sulsel memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimilikinya bila dilihat berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut.

Bambang Sudinyanto (2008), judul penelitian analisis pengaruh dana pihak ketiga, BOP, CAR dan LDR terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana dan pihak ketiga, BOP, CAR dan LDR terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil. Dana pada pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA), biaya operasi (BOPO) berpengaruh *negative* dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA), *Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA), Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA).

Septian Bayu Kristanto (2010), judul penelitian analisis relevansi akuntansi tingkat harga dengan akuntansi konvensional di Indonesia. Tujuan



dari penelitian adalah menguji perbedaan penyajian laporan keuangan dalam tingkat harga umum dan secara konvensional (*historical*) untuk mengambil keputusan ekonomi, khususnya pada perusahaan manufaktur.

Perbedaan akuntansi tingkat harga umum dan akuntansi konvensional :

- a. Akuntansi tingkat harga adalah nilai yang sesungguhnya dari rupiah ditentukan oleh barang atau jasa yang dapat diperoleh. Yang biasa disebut daya beli dalam masa inflasi atau deflasi dan akuntansi tingkat harga ini bernilai depreiasi aktiva tetap akan dikonversi dengan tingkat inflasi, sehingga nilai laba operasi akan menjadi kecil sesuai dengan penambahan biaya, depreasia dengan melihat bahwa nilai penjualan stabil, maka akan menghasilkan nilai yang lebih kecil.
- b. Akuntansi konvensional adalah kenaikan atau penurunan yang terjadi dipasar masukan, pasar keluaran atau keduanya ada dimensi waktu yang terlihat didalamnya. Karena faktor ekonomi tertentu, perubahan harga merupakan kenyataan ekonomi dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. tingkat perubahan harga untuk setiap jenis barang atau jasa dapat berbeda-beda. harga barang yang satu dapat berubah lebih cepat daripada barang yang lain atau bahkan perubahan dengan arah perlawanan harga seluruh barang-barang dalam lingkungan ekonomi tertentu juga dapat berubah secara umum. Dan akuntansi konvensional adalah ukuran kinerja manajer dalam menangani investasi yang dipercayakan kepadanya.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :1) bagi bidang akuntansi, penelitian ini bisa menjadi acuan apakah konsep akuntansi tingkat harga umum sudah mulai relevan untuk diterapkan sebagai pengganti

akuntansi konvensional ataupun sebagai alternatif didalam penyajian 2) bagi perusahaan manufaktur, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, khususnya yang menyangkut daya beli maupun penilaian kinerja manajemen yang lebih relevan dengan tingkat harga umum yang ada. 3) bagi dunia akademis, penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan mengenai penerapan penyajian laporan keuangan bila terdapat kondisi inflasi yang tinggi, maupun informasi-informasi lain yang terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan laporan keuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam semua rasio keuangan. Dengan demikian penyesuaian laporan keuangan dengan tingkat harga umum dipandang belum terlalu penting diterapkan.

Ekonomi Indonesia juga tidak lepas dari inflasi. Dari Tabel 1.1. dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 2003 sampai 2008 selalu lebih dari 5%. Ini berarti harga-harga-harga barang dan jasa menunjukkan keadaan yang selalu naik. (2010) judul penelitian terkait dengan Akuntansi Inflasi dan Hubungannya dengan Keandalan Penyajian Laporan Keuangan .Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ekonomi Indonesia juga tidak lepas dari inflasi. Dari Tabel 1.1. dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 2003 sampai 2008 selalu lebih dari 5%. Ini berarti harga-harga-harga barang dan jasa menunjukkan keadaan yang selalu naik.

Meyhti, Sheffi Teressa (2006), judul penelitian analisis relevansi indikator keuangan. Tujuan penelitian menguji relevansi daya beli pada data laporan keuangan dari bursa efek Indonesia dan Indonesia *capita market directory* selama kurun waktu 2005-2006 yang dihitung dengan menggunakan metode *general price level accounting*. Hasil penelitian menyatakan bahwa

kelemahan dan mendasar dari konsep *historical cost accounting* adalah asumsi bahwa nilai uang stabil atau dengan kata lain perubahan nilai dalam menurut moneter tidak material.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dwi Suharianto, Dharma Thintrin E, (2010). Judul penelitian terkait dengan Translasi laporan keuangan *historical cost Accounting (HCA)* menjadi *general Price Level Accounting (GPLA)* (Studi kasus pada PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk Periode 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah aktiva dan jumlah kewajiban dan ekuitas (*passiva*) sebelum konversi jumlahnya seimbang sebesar Rp 17.716.447,- (dalam jutaan rupiah) menjadi tidak seimbang sesudah konversi yaitu sebesar 17.920.777,- (dalam jutaan rupiah) untuk jumlah aktiva dan Rp 17.748.565,- (dalam jutaan rupiah) untuk jumlah kewajiban dan ekuitas.

Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan setelah dan sebelum dilakukan konversi antara total pos aktiva, hutang dan modal. Menurut Peraturan No VIII G7 tahun 2000 tentang peraturan penyajian laporan keuangan, tingkat materialitas yang ditetapkan sebesar 5%. Sedangkan selisih untuk aktiva sebelum dan setelah konversi sebesar Rp 204.330,- (dalam jutaan rupiah) atau sebesar 2% dan untuk kewajiban dan ekuitas sebelum dan setelah dikonversi terdapat selisih sebesar Rp 49.419,- (dalam jutaan rupiah) atau sebesar 2% , Selisih terhadap aktiva dan *passiva* (kewajiban dan modal) setelah konversi sebesar Rp 172.212,- (dalam jutaan rupiah) atau sebesar 1 %, sehingga perbedaan tersebut dikapitalisasi kedalam saldo laba yang dicadangkan untuk menjaga keseimbangan antara aktiva dan *Passiva* (Kewajiban dan modal) di dalam laporan keuangan neraca.

Keseluruhan perbedaan tersebut bersifat tidak material karena laporan keuangan neraca yang sebelum dan setelah dikonversi ke dalam General Price Level Accounting (GPLA) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dan dibawah tingkat materialitas yang telah ditetapkan. Sehingga penyajian laporan keuangan neraca PT HM Sampoerna dianggap wajar berdasarkan metode GPLA. Sedangkan Laba Rugi Terdapat perbedaan antara besarnya laba sebelum dilakukan konversi yaitu Rp 5.087.339,-(dalam jutaan rupiah) sebelum dikonversi menjadi sebesar Rp 5.179.034,- (dalam jutaan rupiah) setelah dilakukan konversi. Perbedaan ini bersifat tidak material karena perbedaan laba sebelum dan sesudah dikonversi hanya sebesar 1,8 % dibawah dari 10 %, ini diakibatkan oleh adanya kerugian kepemilikan asset moneter yang ada pada perusahaan. Sehingga laporan keuangan laba rugi PT HM Sampoerna dinilai wajar berdasarkan metode *General Price Level Accounting* (GPLA).

Pwee Lenk (2006), judul penelitian Analisis terhadap perlunya penyusuaian laporan keuangan historis (*Conventional Accounting*) menjadi berdasarkan tingkat harga umum (*General Price Level Accounting*). Tujuan penelitian untuk mengadakan pengujian pengaruh tingkat harga umum terhadap laporan keuangan (Neraca, Laporan Laba-rugi, dan Laporan Laba Ditahan) yang disusun berdasarkan nilai historis, serta perubahanperubahan yang signifikan mengenai rasio-rasio keuangan atas dasar nilai historis yang dikonvensi menjadi laporan keuangan atas dasar tingkat harga umum.

Hasil dari penelitian bahwa meskipun akuntansi tingkat harga umum mempunyai arti penting secara umum untuk dimasukkan dalam kerangka akuntansi yang pokok, namun masih ada masalah tentang cara dan alat untuk

melakukan hal tersebut. Masih banyak pendapat tentang bagaimana cara menghitung angka indeks tingkat harga umum dan bagaimana menentukan metode pengukuran perubahan nilai uang untuk menentukan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi perusahaan tertentu. Disisi lain, meskipun belum ada peraturan yang mengatur perlu tidaknya penambahan keterangan pada laporan keuangan yang disesuaikan menjadi tingkat harga umum hingga saat ini, namun untuk kepentingan pihak ketiga perlu dipikirkan manfaatnya guna perbaikan penilaian kinerja manajemen.

Apabila terjadi inflasi tingkat tinggi, dimana tingkat inflasi lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian modal bersih, jumlah aktiva tetap cukup besar, serta perputaran modal kerja rendah, maka penyesuaian laporan keuangan berdasarkan tingkat harga umum perlu untuk dilakukan. Hal lain adalah bahwa penyesuaian akibat perubahan daya beli (berdasarkan tingkat harga dasar) dapat disajikan sebagai laporan penunjang terhadap laporan laporan yang disusun secara konvensional, antara lain berupa penambahan kolom pada laporan konvensional

**Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian variabel yang digunakan	Hasil penelitian
1	Novita amelia (2009)	Laporan keuangan dengan menggunakan metode <i>general price level</i>	Sekunder	Diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu bagi perusahaan yang dapat sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam penyusunan laporan

		<i>accounting</i> pada PT. Gudang garam		keuangan non konvensional, bagi pembaca dapat memberikan informasi sebagai bahan perbandingan untuk penulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan ini, sehingga dalam penulisan ini dapat disempurnakan dalam penulisan berikutnya.
2	Bayu Rahma (2009)	Analisis sumber dan penggunaan dana pada CV. Ujung pandang medan	Deskriptif kualitatif	Sumber dana yang dapat dari laba bersih, dioperasikan penambahan hutang, penambahan obligasi, modal dasar, kas. Dan penggunaan dananya digunakan untuk membayaran deviden surat berharga, penambahan piutang, penambahan persediaan, pembelian mesin penambahan gedung dan penurunan hutang
3	Rhumy Ghulam ACH (2011)	Laporan keuangan pada PT.Bank	Kualitatif	Bahwa analisis kinerja PT BPD Sulseldengan menggunakan metode

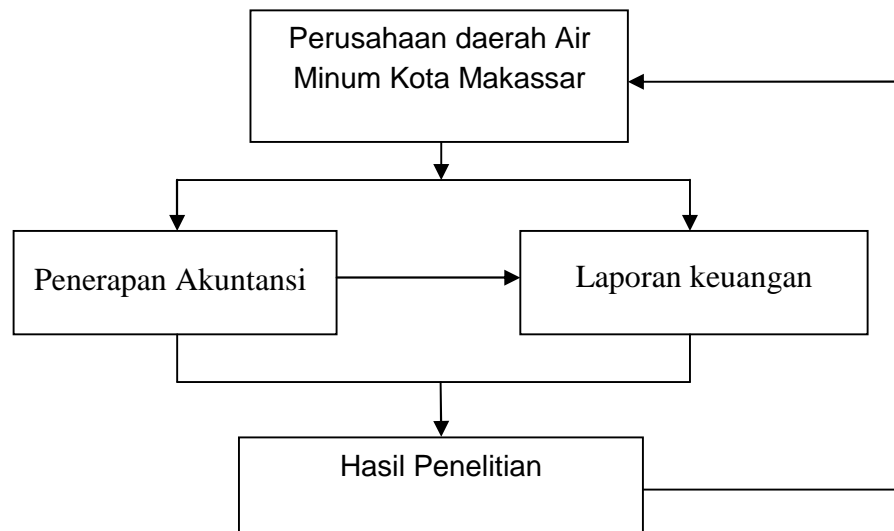
		pembangunan daerah sulawesi selatan		CAMEL pada tahun 2007-2009 berada pada peringkat sehat walaupun mengalami <i>trend</i> yang menurun
4	Bambang sudiyanto (2008)	Analisis pengaruh dana pihak ketiga, bopo, car dan idr terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang <i>go buplik</i> dibursa efek indonesia	Kualitatif	Analisis data dan pembahasan dapat diambil. Dana pada pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA), biaya operasi (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bank.
5	Sebtian bayu kristanto (2010)	Analisis relevansi akuntansi tingkat harga umum dengan akuntansi konvensional diindonesia	Sekunder	Adanya pengaruh yang signifikan dalam semua rasio keuangan. Dengan demikian penyesuaian laporan keuangan dengan tingkat harga umum dipandang belum terlalu penting diterapkan
6	Fatmasari sukesti	Terkait dengan akuntansi inflasi dan hubungannya dengan	General level price current cost	Menunjukkan bahwa ekonomi indonesia juga tidak lepas dari inflasi dapat diketahui bahwa tingkat inflasi

		keandalan  penyajian laporan keuangan		diindonesia dari tahun 2003 sampai 2008 selalu lebih dari 5% ini berarti harga barang dan jasa menunjukkan keadaan yang selalu naik
7	Meyhti, sheffi teresa (2006)	Analisis relevansi indikator keuangan	Sekunder dan panel	Bahwa kelemahan dan mendasar dari konsep historical cost accounting adalah konsumsi bahwa nilai uang stabil atau dengan kata lain perubahan nilai dalam menurut moneter tidak material
8	Dwi Suhartanto dan Dharma Tintri E. (2010)	Terkait dengan transaksi laporan keuangan historical cost accounting (HCA) menjadi gineral pricel level accounting (GPLA) (studi kasus pada PT handjaya mandala sampoerna Tbk	Sekunder	Bahwa jumlah aktiva dan jumlah kewajiban dan ekuiti (passiva) sebelum konvensi jumlahnya seimbang sesudah konversi pada perusahaan sehingga laporan keuangan laba rugi PT HM soempurna dinilai wajar berdasarkan metode <i>general price level acconting</i> (GPLA)



		periode(2009		
9	Pwee Leng (2006)	Analisis terhadap perlunya penyesuaian laporan keuangan historis ( <i>Conventional Accounting</i> ) menjadi berdasarkan tingkat harga umum ( <i>General Price level Accounting</i> )	Sekunder	Bahwa meskipun akuntansi tingkat harga umum mempunyai arti penting secara umum untuk dimasukkan kerangka akuntansi yang pokok, namun masih ada masalah tentang cara dan alat untuk melakukan hal tersebut

### E. Kerangka pikir



Gambar 2.1  
Kerangka Pikir Penelitian

### F. Hipotesis

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu, Diduga bahwa laporan keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar telah menerapkan akuntansi tingkat harga dasar. Sesuai tingkat harga yang ditetapkan perusahaan daerah air minum kota makassar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian.**

Adapun lokasi/tempat penelitian dilakukan pada Perusahaan daerah air minum Kota Makassar yang terletak di Jalan Dr Ratualangi No.3 penelitian ini direncanakan dalam jangka waktu dua bulan.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Dokumentasi yaitu, pengumpulan data yang diperoleh dari PDAM Tirta drama kota makassar berupa laporan Keuangan perusahaan dan yang berkaitan dengan PDAM drama kota mkassar.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa data yang berbentuk angka-angka yang bisa diperoleh dari laporan keuangan pada Perusahaan daerah air minum Kota Makassar.

##### 2. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui data sekunder, kemudian data sekunder yaitu data yang peroleh dari bahan bacaan, berupa buku literatur, jurnal dan sebagainya.

#### D. Metode Analisis Data

Identifikasi variabel perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan acuan dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (Variable Dependen).

Variabel terikat sering pula disebut sebagai variabel tergantung atau dependen Variable. Variabel terikat merupakan faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam sebuah penelitian, untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. “Variabel yang terikat analisis laporan keuangan.”

2. Variabel Bebas (Variable Independen)

Variabel bebas sering pula disebut sebagai variabel penyebab atau independent variables. Pengertian variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan. “Variabel yang bebas akuntansi tingkat harga dasar.”

Metode analisis yang digunakan: ( Pwee Leng : 141-155 )

$$\text{Faktor Konversi} = \frac{\text{Indeks sekarang}}{\text{Indekstahun dasar}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum kota Makassar**

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, terus menerus mengalami perkembangan melalui tahap demi tahap dalam lintasan sejarah yang cukup panjang, berawal pada tahun 1924 dengan dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) I Ratulangi oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama Waterleidjding Bedrijf kapasitas produksi terpasang 50 l/d, kemudian pada jaman pendudukan Jepang tahun 1937 ditingkatkan menjadi 100 l/d, Air baku diambil dari Sungai Jeneberang terletak 7 km disebelah selatan kota, dipompa melalui saluran tertutup ke Instalasi Ratulangi. Tahun 1974 berubah menjadi Dinas Air Minum Kota Madya Ujung Pandang. Seiring dengan usianya IPA Ratulangi berangsur-angsur mengalami penurunan kapasitas produksi.

Tahun 1976 perubahan status PDAM, dari Dinas Air Minum menjadi Perusahaan Air Minum Kodya Ujung Pandang sesuai dengan Perda No. 21/P/II/1976, dengan kapasitas produksi terpasang PDAM turun menjadi 50 l/d, disebabkan karena usia. Untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Kota Makassar yang makin meningkat, maka pada tahun 1977 dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang dengan kapasitas tahap pertama 500 l/d. Sumber Air baku diambil dari Bendung Lekopancing Sungai Maros sejauh 29,6 Km dari Kota Makassar, kemudian tahun 1989 IPA Panaikang ditingkatkan kapasitasnya menjadi 1000//. Tahun 1985 melalui paket pembangunan Perum Perumnas dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) III Antang dengan kapasitas awal 20 l/d, kemudian tahun 1992 dibangun IPA

Antang 2 (dua) dengan demikian total kapasitas IPA Antang menjadi 40 l/d, dari 2 (dua) Instalasi Pengolahan Air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya pada wilayah pelayanan IPA Antang dimana jumlah pelanggan terus bertambah, maka pada tahun 2003 PDAM Kota Makassar menambah kapasitas produksi IPA Antang dari 40 liter/d menjadi 90 liter/d. Tahun 1993 lewat paket bantuan hibah pemerintah pusat, dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) IV Maccini Sombala kapasitas terpasang 200 l/, sumber air baku Sungai Jeneberang. Ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya penduduk. Predikat bumi sebagai "Planet Air" dengan 70% permukaan bumi tertutup air bertolak belakang dengan keadaan Bumi yang menghadapi kelangkaan air. Sebagian besar air di bumi merupakan air asin dan hanya sekitar 2,5% saja yang berupa air tawar, dan kurang dari 1% yang bisa dikonsumsi, sedangkan sisanya merupakan air tanah yang dalam atau berupa es di daerah kutub.

Berkebalikan dengan kondisi keterbatasan air ini, banyak orang mengeksploitasi air secara berlebih. Padahal, semakin terbatas jumlahnya, berlakulah hukum ekonomi, bahwa air merupakan benda ekonomis, dimana orang rela bersusah-susah dan berani membayar mahal untuk mendapatkan air bersih. Sangat luar biasa sekali pemikiran dan kebijakan para pendiri Bangsa Indonesia agar terwujudnya tujuan bangsa yang adil dan sejahtera, dimana telah menempatkan air dalam suatu kerangka kebijakan yang mendasar, yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seiring waktu, pertumbuhan masyarakat yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan industri, banyak yang menggunakan lahan dan air menyebabkan kelangkaan air semakin meningkat. Sumber-sumber air tercemar karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan industri, menyebabkan kualitas air yang bisa langsung dicerna dan dikonsumsi oleh penduduk semakin sedikit. Dibutuhkan suatu badan dan sistem pengelolaan dan penyediaan air baku untuk dikelola menjadi air bersih yang dapat didistribusikan kepada penduduk. Sejarah panjang berdirinya perusahaan pengelolaan air minum, sampai terbentuknya PDAM dan terbitnya UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan air minum.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Aktivitas PDAM antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air ke masyarakat/pelanggan. Setelah sekian lama penyediaan air minum hanya oleh PDAM, sampai tahun 1997 dan puncaknya dengan terbitnya UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, dimana pada Pasal 9 dinyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pada Pasal 1 UU yang sama menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air

adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Yang artinya, air di Indonesia sudah mendapatkan legitimasi untuk menjadi suatu komoditi.

Pasal 45 ayat (3) masih di UU yang sama menyatakan bahwa Pengusahaan sumber daya air (selain sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penjelasan ayat tersebut menyatakan Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi. legitimasi air menjadi suatu komoditi, semakin kuat saat Pemerintah menerbitkan PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pada Pasal 64 dinyatakan bahwa Koperasi dan/atau badan usaha swasta DAPAT berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN.

### **Sejarah Program Penyediaan Air Minum di Indonesia**

Sejarah Program Penyediaan Air Minum di Indonesia identik dengan sejarah pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air minum selama 45 tahun yang terbagi menjadi lima dekade, yaitu era sebelum 1970, 1970 – 1980, 1980 – 1990 dan 1990 – 2000, serta tahun 2000 hingga sekarang.

#### **a. Era Sebelum Tahun 1970**

Seperti negara berkembang lainnya, sistem penyediaan air minum di Indonesia kebanyakan merupakan warisan kolonial. Sebagai contoh:



1. PDAM Kota Semarang yang didirikan pada tahun 1911,
2. PDAM Kota Solo yang didirikan pada tahun 1929,
3. PDAM Kota Salatiga tahun 1921, dan
4. PAM Jaya yang sudah berdiri sejak tahun 1843.

**b. Era Tahun 1970-1980**

Pada era ini, yaitu era Pelita I (1969 – 1974) dan Pelita II (1974 – 1979), pembangunan prasarana dan sarana air minum kurang mendapat prioritas. Demikian pula halnya dengan pembangunan sarana pelayanan masyarakat lainnya, seperti komunikasi, transportasi, dan energi. Dalam dua dasa warsa tersebut titik berat pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan pertanian dan irigasi sebagai upaya memantapkan ketahanan pangan.

Pada Pelita II, terjadi perubahan ekonomi dunia dengan meningkatnya harga minyak bumi di pasaran dunia. Indonesia sebagai negara yang menyimpan sebagian cadangan minyak bumi dunia menjadi sasaran investasi, yang membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan berkembangnya industri hilir dan industri terkait lainnya. Industri tersebut pada umumnya berlokasi di kawasan perkotaan sehingga pertumbuhan ekonomi di perkotaan meningkat cukup pesat.

Pertumbuhan ekonomi di perkotaan tersebut menarik tenaga kerja diperdesaan untuk bermigrasi keperkotaan. Hal ini membawa dampak kepada meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan air minum dan penyehatan lingkungan, energi, komunikasi, dan sebagainya. Untuk mendukung penyediaan air minum Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya:

- 1) Inmendagri No. 26 Tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975 tentang Penyesuaian/Pengalihan Bentuk Perusahaan Air Minum dari Dinas Daerah menjadi Perusahaan Daerah.
- 2) Inmendagri No.32 Tahun 1980 tanggal 18 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan yang berlaku dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.

### **Penyediaan Air Minum di Perkotaan**

Pelayanan air minum di perkotaan pada saat Pelita I dan Pelita II masih mengandalkan jaringan yang dibangun pada masa penjajahan dan investasi tambahan setelah kemerdekaan dengan jumlah yang sangat terbatas. Kondisi tersebut tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Investasi prasarana dan sarana air minum beserta operasi dan pemeliharannya dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri (Sekarang Kementerian Dalam Negeri).

Biaya pembangunan prasarana dan sarana air minum berasal dari APBN, APBD, maupun bantuan luar negeri bilateral, dan multilateral yang berasal dari Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia. Pembangunan prasarana dan sarana air minum berskala kecil biasanya dikaitkan dengan proyek pembangunan lainnya, seperti Kampung Improvement Project I (KIP I).

### **Penyediaan Air Minum di Perdesaan dan Kota Kecil**

Pada periode ini, pembangunan prasarana dan sarana air minum belum menyentuh masyarakat perdesaan dan perkotaan skala kecil (IKK), yaitu wilayah permukiman dengan jumlah penduduk kurang dari 20 ribu

jiwa. Pada umumnya, masyarakat perdesaan mendapatkan air dari sarana tradisional, seperti sumur, mata air, sungai dan sebagainya. Pembangunan prasarana dan sarana air minum di perdesaan sebagian dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan. Selain itu, pembangunan prasarana dan sarana air minum juga dilaksanakan oleh LSM, UNICEF, serta bantuan teknis WHO dan UNDP.

Pembangunan prasarana dan sarana air minum di perdesaan seringkali ditujukan untuk uji coba penerapan teknologi tepat guna, misalnya pompa tangan atau uji coba perangkat lunak seperti konsep Peran Serta Masyarakat dan konsep Pembentukan Lembaga Pengelola. Skala pengembangannya sangat terbatas dan tidak besar, sehingga cakupan pelayanan dan dampaknya juga sangat terbatas. Prasarana dan sarana air minum yang telah dibangun seringkali tidak berlanjut atau mengalami kegagalan, karena prasarana dan sarana yang dibangun tidak dipelihara dengan baik.

### **c. Era Tahun 1980 – 1990**

Pertumbuhan ekonomi pada era 1980-1990 cukup tinggi, dan sektor manufaktur dan teknologi berkembang sangat pesat. Kondisi perekonomian yang baik tersebut sangat kondusif bagi perkembangan sektor infrastruktur. Pada saat yang sama dicanangkan Dekade Air Internasional (1981-1989) yang bertujuan meningkatkan pelayanan air minum bagi semua lapisan masyarakat. Kedua momentum tersebut menjadi pendorong bagi peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat. Sehingga selama Pelita III (1979-1984) dan Pelita IV (1984-1989) terjadi peningkatan investasi yang sangat signifikan di sektor air

minum. Dalam Pelita III pembangunan prasarana dan sarana air minum berhasil meningkatkan cakupan pelayanan air minum sebesar 20-30% dan dalam Pelita IV penyediaan prasarana dan sarana air minum mampu melayani 55% masyarakat. Untuk mewujudkan Dekade Air Internasional, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan regulasi terkait penyediaan air minum:

1. Kepmendagri No.109 Tahun 1982 tanggal 26 April 1982 tentang Pembinaan Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum dan Persatuan Perair Minuman Seluruh Indonesia.
2. Kepmendagri No. 4 Tahun 1984 tanggal 23 Januari 1984 atau Keputusan Bersama Mendagri & Menteri PU No.27/Kpts/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum tehnik Operasi dan Pemeliharaan (SKB Mendagri & Menteri PU).
3. Kepmendagri No. 5 Tahun 1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman<sup>2</sup> Organisasi, Sistem Akuntansi, tehnik perawatan, Struktur dan Perhitungan biaya untuk menentukan tarif pelayanan air minum kepada langganan pengelolaan air bersih ibukota kecamatan dan pengelolaan kran umum air bersih bagi perusahaan daerah air minum dan Badan Pengelola air minum.
4. Kepmendagri No.61 Tahun 1986 tanggal 22 Desember 1986 tentang Persetujuan dan Pengesahan Dewan Pimpinan, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Program Kerja Persetujuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERSAMI) untuk masa Bhakti 1986-1989.

### **Penyediaan Air Minum di Perkotaan**

Selama Pelita III, pemerintah menyediakan investasi cukup besar dibidang penyediaan prasarana dan sarana air minum diperkotaan, termasuk untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan. Pada saat itu, pemerintah mulai melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dalam bentuk pinjaman luar negeri untuk melakukan investasi di sektor air minum. Model pendekatan pembangunan dan standar teknis pengelolaan dirumuskan oleh pemerintah pusat, termasuk untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum di Ibu Kota Kecamatan (IKK).

Pembangunan prasarana dan sarana air minum dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan mengacu kepada standar teknis pelayanan air minum internasional yang mendasarkan perhitungan kepada jumlah penduduk. Dampak dari pelaksanaan standar tersebut adalah terkonsentrasinya investasi prasarana dan sarana air minum pada kawasan-kawasan yang padat penduduk seperti di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Walaupun telah cukup banyak investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum namun laju investasi tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sehingga cakupan pelayanan sulit untuk dinaikkan secara signifikan.

### **Penyediaan Air Minum di Perdesaan dan Kota Kecil**

Pembangunan prasarana dan sarana air minum di kota kecil (dengan jumlah penduduk kurang dari 50.000 jiwa) dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Sebagai pengelolanya dibentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang bersama-sama dengan pemerintah

daerah dikembangkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan pembangunan prasarana dan sarana air minum di perdesaan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPM-PL), Departemen Kesehatan dibantu oleh Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Pola perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui departemen teknis yang menangani.

Pada era ini bantuan kerjasama dan pinjaman luar negeri melalui lembaga keuangan bilateral dan multilateral meningkat terus. Walaupun dalam skala kecil, LSM mulai berperan serta dalam penyediaan prasarana dan sarana air minum di perdesaan dan kota-kota kecil dengan bantuan dana dari berbagai donor nirlaba. Seiring dengan meningkatnya tuntutan otonomi, untuk mendorong kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan prasarana dan sarana air minum maka diciptakan mekanisme hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Walaupun tingkat cakupan pelayanan kepada masyarakat meningkat secara signifikan, namun kinerja pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah dibangun ternyata kurang menggembirakan, banyak prasarana dan sarana yang tidak dapat dioperasikan karena tidak dipelihara secara benar.

#### **d. Era Tahun 1990-2000**

Pelita V (1989-1994) dan Pelita VI (1994-1999) merupakan era globalisasi terutama di bidang ekonomi. Meningkatnya tuntutan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi menyebabkan kendali pemerintah pusat lebih dilonggarkan. Pada saat yang sama, prinsip Dublin-Rio (Dublin-

Rio Principles) diterapkan secara internasional. Keterlibatan dunia swasta di semua sektor meningkat pesat, demikian juga di bidang infrastruktur perkotaan. Pada Repelita VI, pembangunan prasarana dan sarana air minum direncanakan untuk melayani sekitar 60% penduduk perdesaan dan 80% penduduk perkotaan. Krisis ekonomi, yang terjadi sejak Agustus 1997 dan diikuti oleh krisis politik, mengakibatkan terjadinya kemandegan ekonomi, cadangan devisa pemerintah sangat terbatas sehingga anggaran pemerintah yang ada tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana.

Tahun 1997 di sektor air bersih, Bank Dunia mengeluarkan Indonesia Urban Water Supply Sector Policy Framework (IWSPF). IWSPF mengidentifikasi enam perubahan kebijakan yang harus dilakukan yaitu membentuk hubungan terpisah antara pemilik dan pengelola asset, membentuk kerangka peraturan untuk peran serta sektor swasta, meningkatkan manajemen keuangan sektor air minum, menyederhanakan kebijakan tarif, serta meningkatkan perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan proyek-proyek air minum. Dan peran swasta, terlihat sekali dalam kebijakan pengelolaan PDAM DKI Jakarta. Pada tahun 1997, pemerintah memutuskan untuk bekerja sama dengan dua mitra operator swasta asing untuk mengelola dan menyediakan air bersih untuk warga DKI Jakarta. Kedua pihak tersebut adalah Thames Overseas Ltd (PT. Thames PAM Jaya/PT. TPJ) berasal dari Inggris yang kemudian pada tahun 2008 terjadi penjualan salah satu saham di dalam PT Thames Jaya kepada perusahaan asal Singapura, PT Acuatico Ltd dan pihak lainnya adalah Ordeo Suez Lyonnaise de Eaux (PT. Palyja) yang berasal dari

Perancis. Perjanjian kerja sama ini mengikat kedua belah pihak selama 25 tahun dengan bentuk konsesi modifikasi. Hal ini berarti mitra swasta akan diberikan hak pengelolaan penuh untuk seluruh sistem pelayanan PAM Jaya, baik yang sudah mempunyai jaringan perpipaan maupun daerah yang baru sama sekali.

Tahun 1998 Bank Dunia kemudian memberikan Water Utilities Rescue Program, yang bertujuan agar PDAM tetap bisa bertahan dan meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan PDAM sesuai yang digariskan dalam IWSPF. Untuk mendapatkan grant loan dari program ini PDAM diwajibkan membuat Financial Recovery Action Plan (FRAP). FRAP merupakan usulan konkrit yang berisi langkah-langkah untuk:

- 1) meningkatkan pendapatan melalui peningkatan tariff, mengurangi Unaccounted of Water (UfW), dan efisiensi penagihan,
- 2) pengurangan biaya operasional. Selain itu PDAM juga diminta untuk tidak lagi memberikan deviden kepada pemerintah lokal dan melakukan reconstitution Badan Pengawas (BP) PDAM dalam rangka meningkatkan transparansi dan memperkuat kapasitas manajemen dari PDAM.

Masih ditahun 1998, World Bank dan ADB serta sejumlah kreditor bilateral mengeluarkan pinjaman "*Policy Reform Support Loan*" (PRSL) bulan Juni 1998, yang kemudian disusul dengan PRSL II, dimana terdapat rencana untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya air Indonesia, seperti yang tertera dalam *Matrix of Policy Actions* di PRSL II tersebut.

Pada awalnya, Bank Dunia lebih tertarik untuk mengatur sektor kehutanan melalui program *Forest Resources Sector Adjustment Loan*,



namun ditolak oleh Departemen Kehutanan. Kemudian Bank Dunia beralih menawarkan program sejenis kepada sektor pertanian, namun mengalami nasib yang sama sehingga akhirnya Bank Dunia melirik sektor air. Dalam waktu yang bersamaan, tahun 1998, World Bank pun menawarkan pada pemerintah Indonesia, sebuah pinjaman program untuk merestrukturisasi sektor sumber daya air Indonesia, yaitu WATSAL. Bank Dunia pada tanggal 29 Maret 1999, sebagai panduan mereka dalam mengawasi perkembangan pelaksanaan restrukturisasi. Loan Agreement sebesar US\$ 300 juta akhirnya ditandatangani pada tanggal 28 Mei 1999, dengan jangka waktu pengembalian 15 tahun dan grace period selama tiga tahun.

Bersama dengan BAPPENAS dan koordinasi lintas departemen, disepakati untuk membentuk tim lintas departemen bekerjasama dengan staf Bank Dunia menyusun program restrukturisasi sektor air yang salah satunya dalam bentuk penyusunan Undang-undang Sumber Daya Air. Tentu saja tidak ada dana gratis, sehingga Bank Dunia memberikan berbagai persyaratan sebelum dana pinjaman sebesar US\$ 300 juta dalam program Water Sector Adjustment Loan (WATSAL) dapat dicairkan. Salah satu persyaratan tersebut akhirnya dipenuhi dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden (Keppres) No. 96 tahun 2000 yang menyatakan pengelolaan dan penyediaan air minum boleh dikuasai asing sebesar 95%.

Pencairan dana tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap tahap sebelum dana tersebut boleh dicairkan. Pencairan tahap ke dua yang seharusnya dilakukan pada Desember 1999 sempat tertunda karena pemerintah belum mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan

pencairan tahap ke tiga sebesar US\$ 150 juta akan dilakukan jika segala inisiatif reformasi sektor air telah dilakukan sepenuhnya melalui pengesahan Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA). Sedangkan agenda WATSAL tahap ketiga, akan dicairkan jika RUU Sumberdaya Air telah disahkan. RUU Sumber Daya Air ini terbit dengan menjadi UU 7/2004 ttg Sumber Daya Air.

Kasus yang hampir serupa juga dilakukan World Bank di Paraguay, dimana World Bank menunda pencairan US\$ 46 juta pinjaman karena pemerintah Paraguay masih menolak melakukan privatisasi pada sektor air di negara tersebut. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pelayanan air minum dan kinerja PDAM, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan:

- a) Kepmendagri No.16 Tahun 1991 tanggal 6 Pebruari 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- b) Kepmendagri No.22 Tahun 1991 tanggal 27 Pebruari 1991 tentang Peraturan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.
- c) Permendagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
- d) Kepmendagri No. 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

### **Penyediaan Air Minum di Perkotaan**

Investasi prasarana dan sarana air minum pada masa itu banyak berasal dari hutang lembaga keuangan bilateral maupun multilateral. Keberhasilan konsep P3KT yang mengintegrasikan seluruh infrastruktur

perkotaan kedalam satu paket pinjaman menarik perhatian lembaga keuangan bilateral dan multilateral. Pemeran utama pendekatan konsep tersebut adalah Departemen Pekerjaan Umum yang kemudian mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Banyaknya paket pekerjaan yang harus diselesaikan dan terbatasnya sumber daya manusia menjadi kendala dalam peningkatan kualitas prasarana dan sarana permukiman yang dibangun. Hal ini terjadi karena pembinaan teknis, supervisi, dan pengawasan kualitas pekerjaan konstruksi menjadi sangat terbatas dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara bertahap pendekatan kegiatan IKK (Ibu Kota Kecamatan) bergeser ke kota-kota ukuran menengah, namun standar pembangunan IKK masih tetap dijadikan acuan. Cakupan pelayanan masih merupakan tujuan pembangunan, sehingga konstruksi prasarana dan sarana baru menjadi kegiatan utama, sedangkan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi cenderung terabaikan. Pengelolaan PDAM belum dapat dilaksanakan sesuai standar perusahaan, kendala yang dihadapi adalah rendahnya kemampuan mengelola suatu perusahaan, tidak adanya kebebasan dalam menentukan tarif, mahalnya investasi baru, dan terbatasnya sumber daya manusia. Selain kendala tersebut terdapat kendala alam yaitu semakin menipisnya air baku (disebabkan oleh rusaknya lingkungan) yang dapat dimanfaatkan dan ketiadaan sumber air yang dapat dimanfaatkan.

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar PDAM masih bergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat. Pada tahun 1988, disadari bahwa agar PDAM dapat meningkatkan mutu pelayanan air minum kepada

masyarakat maka kebijakan air minum perlu diubah dan pengelolaan PDAM perlu direformasi secara menyeluruh. Pelayanan air minum perlu melibatkan dunia swasta dan dilakukan secara profesional, berorientasi kepada keuntungan (tanpa meninggalkan beban sosial), dan menjauhkan campur tangan birokrasi dalam pengelolaan perusahaan.

### **Penyediaan Air Minum di Perdesaan dan Kota Kecil**

Pelita IV merupakan titik awal dimulainya partisipasi masyarakat dan terlibatnya LSM di tingkat daerah dan nasional dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh lembaga keuangan internasional. Konsep kepemilikan masyarakat dan pendekatan yang didasarkan kepada kebutuhan (Demand Responsive Approach) mulai diterima secara luas, walaupun pelaksanaannya masih dilakukan secara terbatas. Proyek pembangunan prasarana dan sarana sosial (PKT, P3DT, dan sebagainya), termasuk di dalamnya prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, diterima sebagai pendekatan pembangunan alternatif dengan hasil yang cukup bervariasi.

Pada pendekatan ini dilakukan terobosan baru dalam penyaluran anggaran pemerintah dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan prasarana dan sarana. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pembina teknis. Namun demikian, cakupan pelayanan ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan. Persoalan lama selalu berulang dalam prasarana dan sarana air minum yaitu kurang optimalnya pemanfaatan prasarana dan sarana air minum yang telah dibangun karena ketidakmampuan masyarakat untuk mengoperasikan dan memeliharanya.

#### e. Era Tahun 2000-sekarang

Tahun 2000, Indonesia terlibat sebagai peserta Forum Air Dunia yang kedua dan Konferensi Tingkat Menteri di The Hague, Belanda, serta menjadi salah satu negara penandatangan “Deklarasi The Hague”. Forum ini memposisikan air sebagai kebutuhan (komoditi), bukan sebagai hak asasi manusia. Melalui program Water Restructuring Adjustmen Loan (WATSAL) pinjaman penyesuaian struktural di sektor jasa air, Bank Dunia “mensyaratkan” pelaksanaan privatisasi air bagi pencairan pinjaman sebesar 300 juta dollar AS. Di era ini, terkait penyediaan air minum telah terbit:

- 1) Kepmendagri 34/2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 2) UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air.
- 3) PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 4) Permendagri 23/2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
- 5) Permendagri 2/2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Sangat mungkin, meskipun perlahan, sepertinya UU 7/2004 dan PP 16/2005 telah menjadi pintu gerbang bagi kapitalisme untuk menguasai sumber daya air di Indonesia.

- a) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
- b) UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah
- c) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d) UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air

- e) PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- f) Identifikasi Peluang Investasi Watter Supply, 2011, BKPM
- g) Analisa Kinerja Privatisasi Pada PD Pam Jaya, 2009, Asri Fitriani, Thesis, IPB.
- h) Kajian Implikasi Hutang Pada Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Indonesia, Studi Kasus Pdam Kota Surabaya, Malang dan Madiun Jawa Timur, September 2004, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jakarta.

### **Visi, Misi dan Tujuan**

#### 1. Visi

“Menjadi Perusahaan Air Minum yang Sehat, Mandiri dan Profesional.

#### 2. Misi

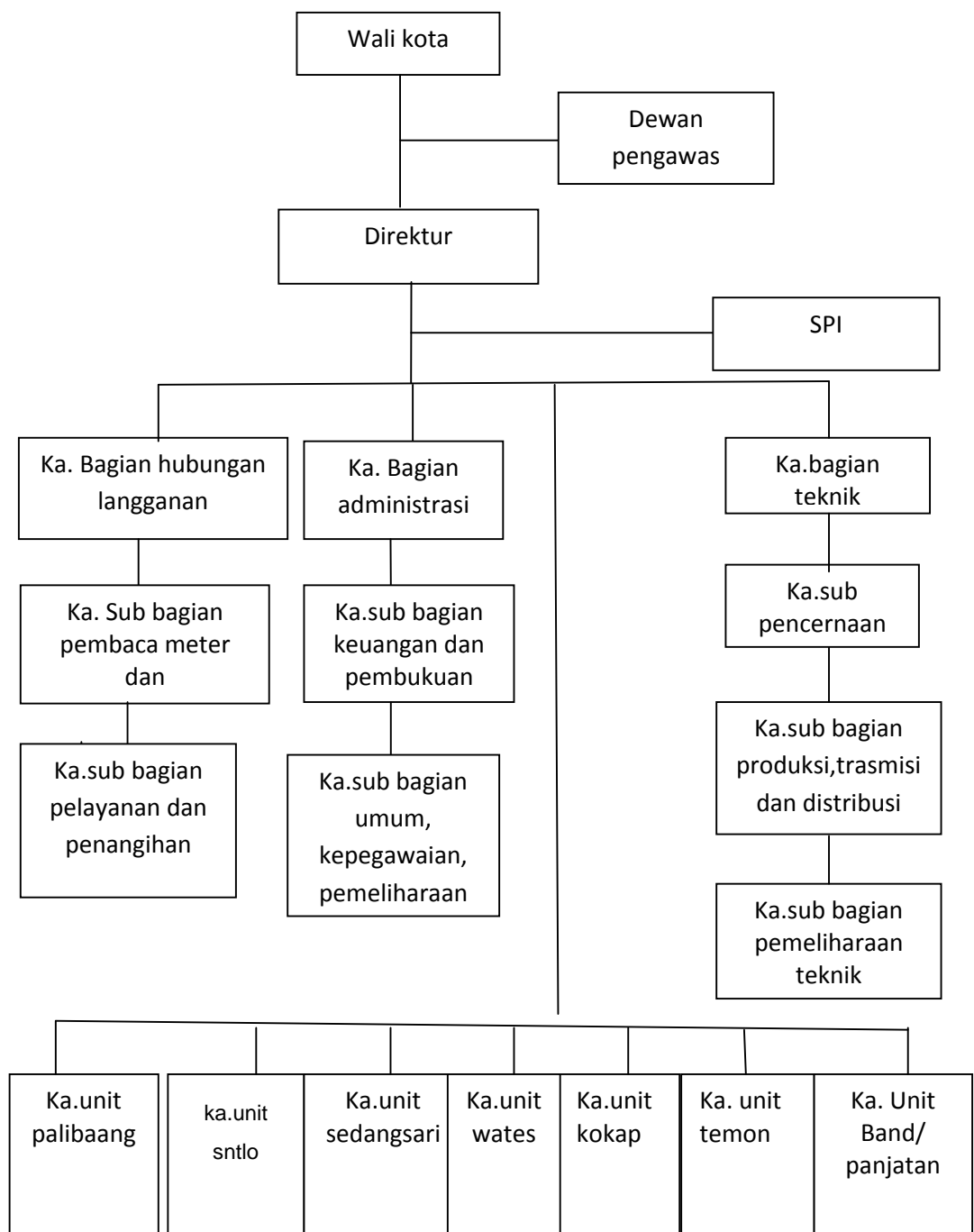
- a. Menyediakan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Melakukan pengelolaan usaha secara profesional dengan teknologi tepat guna dan prinsip-prinsip manajemen.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia.
- d. Turut berpartisipasi dalam mengemban tanggung jawab sosial perusahaan.

#### 3. Tujuan

Memenuhi kebutuhan air bersih dan atau air minum guna meningkatkan kesehatan dan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mencapainya perusahaan berpedoman pada asas ekonomi perusahaan serta prinsip akuntansi perusahaan.

### Struktur organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirta Dharma kota makassar nomor 03 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta kota mkassaro, struktur organisasinya digambarkan sebagaiberikut :



Dari bagan tersebut di atas kita bisa melihat mengenai struktur organisasi yang telah tersusun dan terbentuk secara terencana dan dalam setiap bidangnya tentu saja mendapat pengawasan dari satu Direktur yang mendapat pengawasan langsung dari Dewan Pengawas. Penjelasan mengenai struktur organisasi sebagai berikut :

1. wali kota selaku pemilik modal
2. Dewan Pengawas Terdiri dari :
  - a. Unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan masyarakat konsumen yang diangkat wali kota.
  - b. Dewan pengawas bertanggung jawab kepada wali kota

Tugas Dewan Pengawas :

- 1) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan.
- 2) Memberikan pertimbangan dan saran kepadawali kota baik diminta maupun tidak guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan antara lain mengenai :
  - a) Pengangkatan Direktur
  - b) Program kerja yang diajukan oleh Direktur
  - c) Rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum tirta drama kota makassar
  - d) Rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, dan Menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
- 3) Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan anggaran tahunan



Perusahaan yang dibuat Direktur kepada wali kota untuk mendapatkan pengesahan.

- 4) Menyampaikan laporan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan setiap semester kepada wali kota.

### 3. Direktur

Tugas pokok :

Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta kota makassar.

- a. Memimpin aparat bawahannya secara keseluruhan melalui Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit.
- b. Mengambil keputusan atas semua permasalahan
- c. Bertindak atas nama perusahaan di dalam melaksanakan tugas tugas
- d. pokok.
- e. Menandatangani kontrak, cek dan lain-lain dokumen perusahaan atas nama perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 4. SPI

Tugas Pokok :

- a. Melakukan pengawasan audit intern administrasi / keuangan, hubungan langganan dan teknik atas pengelolaan serta penggunaan kekayaan perusahaan.
- b. Mengawasi penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengawasi pelaksanaan ketentuan / aturan perusahaan.

- d. Mengawasi dan memantau kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta memberikan penilaian dan pembahasan evaluasi secara periodik / berkala.
- e. Memberi petunjuk / bimbingan dan mengambil langkah-langkah yang menyangkut intern perusahaan demi kelancaran perusahaan.
- f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Direktur tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil.

SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan intern di semua bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Bagian Hubungan Langganan

Tugas pokok :

- a. Mengkoordinir semua kegiatan di Bagian Hubungan Langganan.
- b. Memberikan masukan / usul kepada Direktur.
- c. Mengadakan pengawasan semua kegiatan di Bagian Hubungan dan Langganan.
- d. Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian ini mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam bidang Hubungan Langganan. Bagian Hubungan dan Langganan terdiri dari :

#### 6. Sub Bagian Pembaca Meter dan Rekening

- a. Mempunyai fungsi melaksanakan tugas Kepala Bagian Hubungan

b. Langganan di bidang pembacaan meter air dan pembuatan

c. rekening. Adapun tugas pokoknya antara lain :

- 1) Memeriksa penggunaan air berdasarkan meter air yang ada pada setiap pelanggan.
- 2) Mencatat dan melaporkan kondisi meter air pelanggan yang tidak dibaca/ rusak, setiap saat.
- 3) Menerima dan memberikan informasi tentang perubahan status pelanggan dari temuan di lapangan.
- 4) Menampung pengaduan / keluhan dari pelanggan / masyarakat atas kerusakan instalasi jaringan pipa di lapangan untuk disampaikan dan ditindaklanjuti oleh petugas pelayanan pelanggan.
- 5) Mengadakan kontrol ulang pembacaan meter air apabila terjadi ketidakwajaran pemakaian air.
- 6) Menerima dan memberikan informasi adanya pencurian air oleh pelanggan maupun masyarakat.
- 7) Mengkoordinasikan pembuatan rekening air, non air, dan dokumen rekening yang lain serta berkas-berkas yang berkaitan dengan pembuatan rekening.
- 8) Memberikan informasi kepada sub bagian terkait atas pemakaian air oleh pelanggan yang dianggap tidak wajar untuk ditindaklanjuti.
- 9) Mencatat dan mengarsipkan rekening yang salah dengan mencatat dalam buku register.
- 10) Mengkoordinir dropping tangki air.

11) Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan data pelanggan.

12) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Langganan.

#### 7. Sub Bagian Pelayanan dan Penagihan.

Mempunyai fungsi melakukan tugas Kepala Bagian Hubungan Langganan di bidang Pelayanan dan penagihan, adapun tugas pokoknya adalah.

- a. Memberikan informasi dan pelayanan kepada pelanggan atau calon pelanggan mengenai peraturan, prosedur pelayanan, tarif dan hal-hal lain yang perlu diketahui pelanggan calon pelanggan.
- b. Memproses permohonan pemasangan sambungan baru
- c. Mencatat dan meneruskan setiap laporan pengaduan dari pelanggan maupun bukan pelanggan kepada sub bagian yang berwenang.
- d. Melakukan pemasaran untuk penambahan jumlah pelanggan.
- e. Mengadakan penyuluhan tentang air bersih bekerjasama dengan bagian terkait.
- f. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan data pelanggan.
- g. Menyelenggarakan survey kepuasan pelanggan.
- h. Menerima, menyimpan dan melindungi rekening-rekening yang akan ditagihkan maupun yang belum / tidak ditagihkan.
- i. Menerima laporan penagihan rekening serta menyampaikan kepada Bagian Keuangan.
- j. Membuat teguran / peringatan kepada pelanggan yang terlambat membayar dan melakukan penagihan.

- k. Melaporkan tunggakan pembayaran rekening yang melebihi ketentuan kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan.
- l. Melakukan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan dan Langganan.

#### 8. Bagian Administrasi / Keuangan

Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, fungsi bagian ini melaksanakan sebagian tugas Direktur di bagian Administrasi dan keuangan. Adapun tugas pokoknya antarlain :

- a. Mengkoordinasi semua kegiatan di bagian Administrasi /keuangan.
- b. Memberi pengarahan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- c. Memberi masukan / usul kepada Direktur
- d. Mengadakan pengawasan semua kegiatan di Bagian Administrasi /Keuangan.
- e. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan Bagian Administrasi/Keuangan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

Bagian Administrasi / Keuangan terdiri dari :

##### 1. Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan

Mempunyai fungsi melaksanakan tugas Kepala Bagian Administrsi / Keuangan di bidang Keuangan dan Pembukuan, adapun tugas pokoknya antara lain :

- a. Menghimpun usulan anggaran dari semua bagian secara periodik.

- b. Membuat rencana anggaran sesuai skala prioritas mengenai rencana investasi, pendapatan, biaya, penerimaan dan pengeluaran kas.
  - c. Membuat daftar rencana pengeluaran dan harian.
  - d. Menjalankan rencana anggaran yang telah disetujui.
  - e. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan anggaran perusahaan.
  - f. Menganalisa dan mencermati kondisi keuangan perusahaan pada setiap periode.
  - g. Menyelenggarakan pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada operasi harian dengan metode aktual.
  - h. Mengkoordinir pembukuan atas transaksi harian ke dalam buku / jurnal harian dengan menganut sistem akuntansi yang berlaku.
  - i. Menyajikan laporan yang diperlukan setiap periode yang telah ditentukan. Menganalisa dan mencermati laporan keuangan perusahaan pada setiap periode.
  - j. Memberi pengarahan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
  - k. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan data keuangan
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi / Keuangan.
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Pemeliharaan Umum dan Logistik.

Mempunyai fungsi melaksanakan tugas Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan di Bidang Administrasi Umum Kepegawaian, Pemeliharaan Umum dan Logistik, adapun tugas pokoknya antara lain :

- a. Melakukan pengadaan/pembelian barang-barang yang dibutuhkan perusahaan dengan atau tanpa melibatkan Tim Pembelian perusahaan.
- b. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan, kearsipan, ekspedisi, humas, rumah tangga, dokumentasi, perjalanan dinas, keprotokolan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor perusahaan.
- c. Menyelenggarakan segala urusan yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai.
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai.
- e. Mengelola dasar dari struktur gaji, penggajian pegawai dan pemberian tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai.
- f. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perusahaan.
- g. Mengatur, menginventarisasi dan menyelenggarakan administrasi aset milik perusahaan.
- h. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung kantor dan inventaris kantor
- i. Menghimpun dan mengusulkan pengadaan / pembelian barang-barang yang dibutuhkan perusahaan dari semua bagian secara periodik.
- j. Menyelenggarakan persediaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang-barang gudang.

- k. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan data yang berkaitan dengan Administrasi Umum Kepegawaian, Pemeliharaan Umum dan Logistik.
- l. Memberi pengarahan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang Pemeliharaan Umum dan Logistik.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi / Keuangan.

#### 9. Bagian Teknik

Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Direktur dibagian teknik. Adapun tugas pokoknya adalah :

- a. Mengkoordinasikan semua kegiatan diBagian Teknik
- b. Memberi pengarahan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- c. Memberi masukan / usul kepada Direktur
- d. Mengadakan pengawasan semua kegiatan di Bidang Teknik.
- e. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan data teknik.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### 10. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai fungsi melaksanakan tugas Kepala Bagian Teknik di bidang Perencanaan Teknik. Adapun tugas pokoknya antara lain :



- a. Melakukan survey pengembangan jaringan, rencana anggaran biaya dan gambar.
- b. Menyusun rencana anggaran biaya calon pelanggan dan gambar.
- c. Menyusun analisa harga upah dan bahan.
- d. Merencanakan rehabilitasi gedung kantor, jaringan pipa dan sarana lainnya yang diperlukan perusahaan.
- e. Meyimpan dan merawat gambar-gambar teknik yang dimiliki perusahaan.
- f. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan pelaporan data perencanaan.
- g. Membantu kegiatan sosialisasi mengenai air minum kepada pelanggan / calon pelanggan.
- h. Secara berkala mengumpulkan data teknik dan informasi untuk pengembangan jaringan pipa dan sumber-sumber air baru.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

11. Sub Bagian Produksi & Transmisi / Distribusi.

Mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. Menyelenggarakan pemeliharaan sumber-sumber air baku serta keamanan lingkungannya.
- b. Mengendalikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi.
- c. Menyelenggarakan pengoperasian, pemeliharaan dan pengendalian sarana produksi.
- d. Menentukan sistem pengelolaan air sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan persyaratan kesehatan.

- e. Menyelenggarakan penelitian dan analisa laboratorium terhadap kualitas air secara berkala.
- f. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan jaringan pipa transmisi dan distribusi.
- g. Menyelenggarakan peraturan dan pengendalian pendistribusian air kepelanggan.
- h. Menyelenggarakan pengawasan terhadap kebocoran air.
- i. Menyelenggarakan perbaikan kebocoran dan kerusakan jaringan pipa transmisi distribusi.
- j. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan data produksi dan transmisi/distribusi.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

#### 12. Sub Bagian Pemeliharaan Teknik

Tugas pokoknya antara lain :

- a. Membuat rencana pemeliharaan dan perbaikan teknik.
- b. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan teknik.
- c. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan pelaporan data pemeliharaan teknik.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

### 13. Unit PDAM

Tugas pokok unit ini adalah :

- a. Mengkoordinir, mengatur dan mengarahkan bawahannya.
- b. Menyusun rencana dan mengkoordinasikan kegiatan unit.
- c. Mengajukan usaha kebutuhan bahan dan peralatan unit.
- d. Melaksanakan survey dan pemasangan sambungan pelanggan.
- e. Melaksanakan penyegelan dan pemutusan sambungan pelanggan.
- f. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit.
- g. Melaksanakan monitoring pelayanan kepada pelanggan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur

### 14. Data Keuangan

Data keuangan bersumber dari:

- a. Neraca tahun 2015, 2016 dan 2017
- b. Laporan laba-rugi tahun 2015, 2016 dan 2017

Data yang diperlukan untuk menganalisis keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kota Makassar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi data Keuangan untuk menghitung rasio likuiditas PDAM Tirta Dharma kota Makassar pada tahun 2015-2017.

Keterangan	Tahun		
	2015 (RP)	2016(RP)	2017 (RP)
Aktiva Lancar	122,911,444,682.32]	178,240,011,713.11	202,319,677,859.00
Utang Lancar	241,949,624,256.29	42,540,000,472.62	65,169,950,694.00
Kas & Setara kas	82,522,575,626.42	134,230,464,376.37	142,907,476,971.00
Persediaan	5,986,463,735. 24	8,552,712,297.14	23,839,036,730.00
Aktiva lancar-Persediaan	1,1692,498.13	1,696,873.13	1,784,064.13

Sumber :Laporan Keuangan PDAM Tirta Drama Kota Makassar, 2018

Tabel 3. Rekapitulasi data keuangan untuk menghitung rasio solvabilitas

PDAM Tirta Dharma kota Makassar pada tahun 2015-2017.

Keterangan	Tahun		
	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
Total aktiva	317,078,695,923.88	377,825,129,280.69	431,244,514,860.00
Total hutang lancar	241,949,624,256.29	42,540,000,472.62	65,169,950,694.00
Modal	189,564,680,216.35	425,726,612,630.35	425,726,612,630.00

Sumber: Laporan Keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Makassar, 2018

Tabel 4. Rekapitulasi data keuangan untuk menghitung rasio rentabilitas

PDAM Tirta Dharma kota Makassar pada tahun 2015-2017 .

Keterangan	Tahun		
	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
Total Aktiva	317,078,695,923.88	377,825,129,280.69	431,244,514,860.00
Utang Pajak	12,190,822,325.78	17,443,450,874.61	16,315,048,895.00
Modal	189,564,680,216.35	425,726,612,630.35	425,726,612,630.00

Sumber: Laporan Keuangan PDAM Tirta Dharma Kota Makassar, 2018

## B. Hasil Penelitian

Dari Laporan keuangan yang telah diemukakan diatas dapat dijelaskan berbagai hal yaitu:

### 1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi pada saat yang tepat. Rasio Lancar (*Current Ratio*) Rasio ini adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka panjang. Cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{total aktiva lancar}}{\text{total kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Analisis likuiditas tahun 2015, 2016 dan 2017 PDAM Tirta Dharma Kota Makassar.

$$\text{a) Tahun 2015} = \frac{122,911,444,682.32}{241,949,624,256.29} \times 100\%$$

$$= 5080,04 \%$$

$$\text{b) Tahun 2016} = \frac{178,240,011,713.11}{42,540,000,472.62} \times 100\%$$

$$= 4189,93 \%$$

$$\text{c) Tahun 2017} = \frac{202,319,677,859.00}{241,949,624,256.29} \times 100\%$$

$$= 3104,49 \%$$

Tabel 5. Hasil Analisis Rasio Likuiditas dengan perhitungan *Current Ratio*.

Keterangan	Tahun		
	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
<i>Current Ratio</i>	5080,04	4189,93	3104,49

Sumber : data yang telah diolah , 2018

Dari tabel hasil analisis rasio likuiditas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa:

Tahun 2015 diperoleh *Current Ratio* sebesar 5080,04 % yang berarti setiap Rp 1,00 utang lancar akan dijamin oleh Rp 5080,04 dari aktiva lancar. Tahun 2016 *Current Ratio* menurun menjadi 4189,93 % yang berarti setiap Rp 1,00 utang lancar akan dijamin dengan aktiva lancar perusahaan sebesar Rp4189,93. Tahun 2017 *Current Ratio* sebesar RP 3104,49 % hal ini berarti setiap Rp 1,00 utang lancar akan dijamin oleh Rp

3104,49 aktiva lancar. Apabila tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, maka *current ratio* mengalami penurunan sebesar 890,11%.

Tahun 2017 *current ratio* sebesar RP 3104,49 % mengalami kenaikan rasio sebesar 108,544 % bila dibanding tahun 2016.

Rasio Cepat ( *Quick Ratio* )

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban, tanpa harus melikuidasi atau bergantung pada persediaan. Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar-sediaan}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Analisis likuiditas tahun 2015, 2016 dan 2017 PDAM Tirta dhrama kota makassar.

$$\begin{aligned} \text{a) Tahun 2015} &= \frac{1,1692,498.13}{241,949,624,256.29} \times 100\% \\ &= 0,04 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Tahun 2016} &= \frac{1,696,873.13}{42,540,000,472.62} \times 100\% \\ &= 3,98 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) Tahun 2017} &= \frac{1,784,064.13}{65,169,950,694.00} \times 100\% \\ &= 0,02 \% \end{aligned}$$

Tabel 6. Hasil Analisis Ratio Likuiditas dengan perhitungan *Quick Ratio*

Keterangan	Tahun		
	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
<i>Quick Ratio</i>	0,04	3,98	0,02

Sumber : Data yang telah diolah, 2018

Dari tabel hasil analisis rasio solvabilitas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa:

Tahun 2015 diperoleh *Quick Ratio* sebesar 0,04 % berarti setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 akan dijamin sebesar Rp 0,04 aktiva lancar dikurangi persediaan . Tahun 2016 *Quick Ratio* sebesar RP 3,98% berarti setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 akan dijamin sebesar Rp 3,98 aktiva lancar dikurangi persediaan. Tahun 2017, *Quick Ratio* sebesar RP 0,02% yang berarti bahwa setiap Rp 1,00 utang lancar akan dijamin sebesar Rp 0,02% oleh aktiva lancar yang dikurangi dengan persediaan. Apabila tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, maka *Quick Ratio* mengalami penurunan sebesar 394% yang disebabkan turunnya aktiva lancar dikurangi persediaan dan naiknya utang lancar. Tahun 2017 *Quick Ratio* sebesar 0,02% mengalami kenaikan sebesar RP 0,02%

## 2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

### a. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu utang. Cara perhitungan adalah :

$$b. \textit{Debt Equity Ratio} = \frac{\text{total aktiva lancar}}{\text{total modal}} \times 100\%$$

### Debt to Total Assets Ratio

Rasio ini menunjukkan seberapa bagian dari dana perusahaan yang berasal dari pinjaman. Semakin tinggi presentase yang dicapai

berarti semakin kecil pula aktiva yang digunakan untuk menjami terbayarnya utang-utang apabila perusahaan tersebut sewaktu-waktu dilikuidasi. Secara sistematis rasio ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Total\ Assets\ Ratio = \frac{\text{total hutang lancar}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Analisis solvabilitas tahun 2015, 2016 dan 2017 PDAM Tirta Dharma kota makassar.

*Debt to Equity Ratio*

$$\begin{aligned} \text{a) Tahun 2015} &= \frac{241,949,624,256.29}{317,078,695,923.88} \times 100\% \\ &= 7630,58\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Tahun 2016} &= \frac{4\,254,000,472.62}{377,825,129,280.69} \times 100\% \\ &= 1125,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) Tahun 2016} &= \frac{65,169,950,694.00}{431,244,514,860.00} \times 100\% \\ &= 1511,20\% \end{aligned}$$

Tabel 7. Hasil perhitungan Analisis Rasio Solvalibilitas dengan perhitungan *Debt Equity Ratio*

Keterangan	Tahun		
	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
<i>Debt to Equity Ratio</i>	7630,58	1125,17	1511,20

Sumber :data yang telah diolah,2018

Dari tabel hasil analisis rasio solvabilitas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa:



Tahun 2015, *Debt to Equity Ratio* sebesar RP 7630,58% dari rasio ini dapat dikatakan bahwa setiap Rp 1,00 utang dijamin dengan 7630,58 modal sendiri. Tahun 2016 diperoleh *Debt to Equity Ratio* sebesar RP 1125,17% yang berarti setiap Rp1,00 utang dijamin dengan Rp 0, 1125,17 modal sendiri. Pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 1,14% dari tahun 2015, yang disebabkan oleh naiknya total utang dan menurunnya modal sendiri. Penurunan modal sendiri disebabkan menurunnya akumulasi kerugian. Tahun 2017 sebesar 1511,20% ini berarti setiap Rp 1,00 utang dijamin dengan Rp1511,20 modal sendiri. Rasio pada tahun 2017 mengalami penurunan 386,03% dari tahun 2016, hal ini disebabkan menurunnya utang dan meningkatnya modal sendiri. Kenaikan modal sendiri disebabkan naiknya kekayaan dari pemda.

*Debt to Total Assets Ratio*

$$\text{a) Tahun 2015} = \frac{241,949,624,256.29}{317,078,695,923.88} \times 100\%$$

$$= 7630,58 \%$$

$$\text{b) Tahun 2016} = \frac{42,540,000,472.62}{377,825,129,280.69} \times 100\%$$

$$= 1125,17 \%$$

$$\text{c) tahun 2017} = \frac{65,169,950,694.00}{431,244,514,860.00} \times 100\%$$

$$= 1511,20 \%$$

Tabel 8. Hasil Analisis Rasio Solvabilitas dengan perhitungan *Debt to Total Assets Ratio*.

Keterangan	Tahun		
	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
<i>Debt to Total Assets Ratio</i>	7630,58	1125,17	1511, 20

Dari tabel hasil analisis rasio solvabilitas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa:

Tahun 2015, *Debt to Total Assets Ratio* sebesar 7630,58% menunjukkan bahwa setiap total utang Rp 1,00 dijamin dengan Rp 7630,58 aktiva perusahaan. Tahun 2016, *Debt to Total Assets Ratio* mencapai 1125,17% menunjukkan bahwa setiap total utang Rp 1,00 dijamin dengan Rp 1125,17 aktiva perusahaan. Rasio tahun ini mengalami kenaikan sebesar RP 1125,17 % yang disebabkan turunnya aktiva dan modal. Tahun 2017 *Debt to Total Assets Ratio* sebesar 1511,20% yang artinya bahwa setiap total utang sebesar Rp 1,00 dijamin dengan Rp 0,04% aktiva perusahaan. *Debt to Total Assets Ratio* pada tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan naiknya total aktiva dan turunnya total utang.

### 3. Rasio Rentabilitas

Rentabilitas merupakan rasio untuk menghasilkan laba perusahaan yang diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam kemampuannya menggunakan aktiva secara produktif. Cara penilaian rentabilitas ada beberapa macam sesuai dengan tujuan perusahaan pada analisis. Namun

pada tugas akhir ini hanya penulis batasi pada dua macam yaitu *Net Rate of Return on Investment* dan *Return on Equity*.

1. *Net Rate of Return on Investment*

$$\text{Net Rate of Return on Investment} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{a) Tahun 2015} = \frac{47,622,973,849.00}{317,078,695,923.88} \times 100\%$$

$$= 1501,92 \%$$

$$\text{b) Tahun 2016} = \frac{64,043,873,413.00}{377,825,129,280.69} \times 100\%$$

$$= 1695,06 \%$$

$$\text{c) Tahun 2016} = \frac{75,620,119,371.00}{431,244,514,860.00} \times 100\%$$

$$= 1753,53 \%$$

Tabel 9. Hasil Analisis Rasio Rentabilitas dengan perhitungan *Net rate of ROI*.

Keterangan	Tahun		
	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)
<i>Return on Equity</i>	1501,92	1695,06	1753,53 %

Sumber: Data yang telah diolah, 2018

Dari tabel hasil analisis rasio solvabilitas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa:

Tahun 2015, *Return On Equity* sebesar 1501,92 % yang artinya bahwa setiap Rp 1,00 modal dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp1501,92. Tahun 2016, *Return on Equity* sebesar 1695,06 % yang artinya bahwa setiap Rp 1,00 modal dapat menghasilkan laba sebesar Rp.

1501,92 Pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2011 yang disebabkan menurunnya modal dan laba bersih. Tahun 2017, *Return on Equity* sebesar 1753,53 % yang artinya bahwa setiap Rp 1,00 dapat menghasilkan laba sebesar Rp 1753,53 dari modal sendiri yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Pada tahun 2013 perusahaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang disebabkan kembali meningkatnya laba dan modal perusahaan.

## 2. *Return on equity*

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{modal sendiri}} \times 100\%$$

$$\text{a) Tahun 2015} = \frac{47,622,973,849.00}{189,564,680,216,35} \times 100\%$$

$$= 2512,22 \%$$

$$\text{b) Tahun 2016} = \frac{64,043,873,413.00}{425,726,612,630.35} \times 100\%$$

$$= 1504,34 \%$$

$$\text{c) Tahun 2017} = \frac{75,620,119,371.00}{425,726,612,630.00} \times 100 \%$$

$$= 1776,60 \%$$

Tabel 10. Hasil Analisis Rasio Rentabilitas dengan perhitungan *ROE*

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<i>Return on Equity</i>	2512,22	1504,34	1776,60

Sumber : Data yang telah diolah, 2018

Dari tabel analisis rasio rentabilitas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa:

Tahun 2015, *Return On Equity* sebesar 2512,22 % yang artinya bahwa setiap Rp 1,00 modal dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp 2512,22. Tahun 2016, *Return on Equity* 1504,34% yang artinya bahwa setiap Rp 1,00 modal dapat menghasilkan laba sebesar Rp 1504,34. Pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 yang disebabkan menurunnya modal dan laba bersih. Tahun 2017, *Return on Equity* sebesar 1776,60 % yang artinya bahwa setiap Rp 1,00 dapat menghasilkan laba sebesar Rp 1776,60 dari modal sendiri yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Pada tahun 2017 perusahaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang disebabkan kembali meningkatnya laba dan modal perusahaan.

### **C. Pembahasan**

Hasil analisis terhadap data keuangan baik analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas untuk menilai Tingkat harga dasar PDAM Dharma kota makassar. Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas digunakan untuk menilai posisi keuangan PDAM Tirta Dharma kota makassar dan analisis rasio rentabilitas digunakan untuk menilai tingkat harga dasar PDAM Tirta Dharma kota makassar.

#### **1. Rasio Likuiditas**

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus

segera dipenuhi pada saat yang tepat. Rasio Lancar (*Current Ratio*) Rasio ini adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka panjang. Pada tahun 2015 mengalami penurunan. tahun 2016 masih dalam keadaan stabil. Tahun 2017 mengalami kenaikan traditis dari tahun sebelumnya.

Sabtian bayu kristanto menyatakan bahwa dari tingkat likuiditas pada perusahaan daera air minum kota makassar sangat tinggi dikarenakan aktiva lancar lebih besar utang lancar. Hutang lancar timbul karena adanya bahan baku, pada perusahaan daerah air kota makassar.

## **2. Rasio Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tahun 2015 mengalami kenaikan. Tahun 2016 mengalami kenaikan. Tahun 2017 mengalami kenaikan.

Pwee leng menyatakan bahwa dari seluruh posisi keuangan sangat baik karena nilai hutang lebih sedikit dari nilai modal sendiri. Rasio ini juga termasuk dalam kreterial sangat baik karena total hutang lebih rendah dari total aktiva. Jadi perusahaan daerah air minum kota makassar dapat dikatakan perusahaan solvable. Karena perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dilikuidasi.

### **3. Rasio Rentabilitas**

Rentabilitas merupakan rasio untuk menghasilkan laba perusahaan yang diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam kemampuannya menggunakan aktiva secara produktif. pada tahun 2015 masih dalam keadaan stabil. Tahun 2016 mengalami penurunan. Tahun 2017 mengalami kenaikan.

Dwi suhartanto menyatakan bahwa rasio rentabilitas perusahaan dalam kondisi yang baik dan menunjak tinggi. Untuk saat ini perusahaan daerah air minum kota makassar merupakan perusahaan yang profit.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan PDAM Tirta Dharma kota makassar selama kurun waktu tiga periode bahwa:

1. *Quick Ratio* tahun 2015 sebesar 0,04%, tahun 2016 sebesar 3,98% dan tahun 2017 sebesar 0,02%. Dengan demikian PDAM Tirta dharma kota makassar dapat dikatakan perusahaan yang *likuid*.
2. Rasio Solvabilitas tahun 2015 adalah 7630,58%; tahun 2016 adalah 1125,17 % dan tahun 2017 adalah 1511,20%. Hal ini mengalami turun naik sehingga tingkat solvabilitas PDAM Kota Makassar belum stabil.
3. Rasio retabilitas tahun 2015 adalah 1501,92%; tahun 2016 adalah 1695,06% dan tahun 2017 adalah 1753,53% dengan demikian PDAM Kota Makassar dapat memperoleh laba yang meningkat dari tahun ketahun.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar telah menerapkan akuntansi tingkat harga dasar. Sesuai tingkat harga yang ditetapkan di perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis mengajukan saran, agar perusahaan lebih meningkatkan tingkat harga dasar dan mengifienkan biaya-biaya perusahaan.



selain itu kemukakan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AJC G.R, 2011. *Penelitian Analisis Laporan Keuangan*, Pustaka Baru, Jakarta
- Benstrin, 1983. *Analisis laporan keuangan dan penerapan metode dan tehnik analisis laporan*, Salemba Empat, Yogyakarta
- Cahyaningrum H, N, 2005. *Analisis Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memproduksi Pertumbuhan laba*, Universitas Ponorogo, Semarang
- Dwi S,D,T,E. 2010. *Trasaksi laporan Keuangan Kistorical Cost Accounting (HCA) Menjadi General Prices level Accounting (GPLA)* Gunadarma, Depok
- Harahap, Sofyan S. 2013. *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan*, Set.1 Jakarta
- Kasmir, 2015. *Analisis laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2016. *Analisis laporan Keuangan*, Edisi Pertama Cet. 9 Jakarta
- Kristanto B.S, 2010. *Penelitan Analisis Relavansi Akutansi Tingkat Harga Umum Dengan Akutansi Konvesional DiIndonesia*, Universitas Kristen Kridan Wacana, Jakarta
- Munawir, 2011. *Tehnik Analisis Terhadap laporan Keuangan*, Ponerogo ,Yogyakarta
- Rahman B.M, 2009. *Penelitian Analisis Sumber Dari Penggunaan Dana CV. Ujung Pandang Sumatra Utara*. Universitas Negri Yogyakarta
- Sudiyanto B, 2008. *Pengaruh Pana Pihak Ketiga, popo,car, terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan*, Magelang, Jakarta
- Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi Makassar*
- Yahya, 2009. *Analisis laporan keaungan dan kepentingan dalam DiKabupaten Magelang*. Sukarta
- Yusuf M, 2014. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Pranada Media Group, Jakarta

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## RIWAYAT HIDUP



**Sumarni.** Buah kasih sayang dari pasangan Abakar dan Nani penulis. Lahir di Mpili pada tanggal 25 Desember 1994. Anak ketiga dari empat bersaudara.dan merupakan menempuh sekolah dasar di SDN O,O Donggo mulai tahun 2001 sampai tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Donggo dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Donggo dan tamat tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 penulis berhasil lulus pada jurusan Akuntansi ,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1) ekonomi..